



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN TAHUNAN 2024

**Pelabuhan Perikanan
Nusantara Pekalongan**

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan 2024 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan ini merupakan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan, baik yang menyangkut kegiatan rutin pembangunan maupun kegiatan lainnya di PPN Pekalongan.

Tujuan dari pembuatan Laporan Tahunan adalah untuk memberikan informasi/gambaran mengenai perkembangan capaian operasional PPN Pekalongan selama Tahun 2024 serta sebagai acuan perbaikan kinerja organisasi pada tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Tahunan yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan *stakeholders* terkait pada khususnya, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, Januari 2025

Kepala PPN Pekalongan



Kartono, A.Pi., M.P.

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Visi dan Misi	5
D. Tujuan	6
E. Manfaat Pelaporan	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI	9
A. Kedudukan Tugas dan Fungsi	9
1. Kedudukan	9
2. Tugas	9
3. Fungsi	9
B. Struktur Organisasi	11
C. Komposisi Pegawai	11
D. Hubungan Kelembagaan	15
BAB III. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN & PERKEMBANGAN	
CAPAIAN KINERJA PELABUHAN	17
A. Alokasi Anggaran	17

B. Realisasi Penyerapan Anggaran	22
C. Perkembangan Penyerapan Anggaran	25
D. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	25
1. Capaian PNBP SDA Perikanan Pascaproduksi	26
2. Capaian PNBP Non SDA Perikanan	26
E. Capaian Kinerja Pelabuhan.....	28
BAB IV. KERAGAAN OPERASIONAL	31
A. Produksi dan Harga Ikan	31
B. Musim Penangkapan.....	32
C. Daerah Penangkapan Ikan	33
D. Armada Perikanan	34
E. Jenis Ikan Hasil Tangkapan	36
F. Pemasaran dan Distribusi Ikan	40
G. Nelayan	45
H. Inspeksi Pengendalian Mutu	46
I. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	47
J. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)	48
K. <i>Log Book</i> Penangkapan Ikan	49
L. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)	51
M. Operasional Kesyahbandaran	52
BAB V. KERAGAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PELABUHAN	55
A. Kegiatan Non Fisik	55
1. Persuratan dan Kearsipan	55
2. Kunjungan Tamu	57
3. Wisata Bahari	57
4. Pengelolaan Kehumasan	60

5. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja	62
6. Survei Kepuasan Masyarakat	63
7. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan	66
8. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan	68
9. Patroli Dialogis dan Pengawasan dan Perlindungan Maritim di Kawasan PPN Pekalongan	71
10. Sosialisasi Penanganan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan.....	73
11. Sosialisasi Penanganan Kebakaran di Kawasan Pelabuhan	78
12. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015	81
13. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan dan Cara Penanganan Ikan yang Baik	84
14. Pertemuan dengan Pengguna Jasa Terkait Fungsi Pengusahaan di PPN Pekalongan	85
15. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (Tausiyah)	88
16. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	89
17. Sosialisasi Technical Coopertion Guidelines (TCG) RI-RRT.....	91
B. Kegiatan Fisik	95
1. Peninggian Dermaga Bongkar	96
2. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan	96
C. Inventarisasi dan Investigasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	97
1. Penyiapan Bahan Perencanaan Pembangunan.....	98
2. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya	98

BAB VI. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA	103
A. Permasalahan	103
B. Upaya Pemecahannya	104
BAB VII. PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran dan Kritik	106

DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	12
Tabel 2. Daftar Pegawai PPN Pekalongan yang memperoleh kenaikan pangkat	14
Tabel 3. Revisi DIPA PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2024	17
Tabel 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024	22
Tabel 5. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)	22
Tabel 6. Capaian PNBPN SDA Perikanan Pasca Produksi Tahun 2024	26
Tabel 7. Capaian PNBPN Non SDA Perikanan Tahun 2024 di PPN Pekalongan.....	24
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Pekalongan Tahun 2024	26
Tabel 9. Perkembangan Jumlah Produksi dan Nilai Produksi di PPN Pekalongan Tahun 2015-2024	31
Tabel 10. Perkembangan Armada Perikanan PPN Pekalongan Tahun 2015 - 2024	33
Tabel 11. Perkembangan Daerah Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan Tahun 2024....	34
Tabel 12. Perkembangan Armada Perikanan berdasarkan Alat Tangkap yang digunakan di PPN Pekalongan Tahun 2024	35
Tabel 13. Perkembangan Jumlah Trip Kapal dan Kapal Bongkar di PPN Pekalongan Tahun 2023-2024	35
Tabel 14. Perkembangan Jumlah Trip Kapal dan Kapal Bongkar di PPN Pekalongan Tahun 2024.....	36
Tabel 15. Perkembangan Volume, Nilai, dan Harga Rata-rata Ikan Hasil Tangkapan di PPN Pekalongan Tahun 2024	37
Tabel 16. Daerah Tujuan Pemasaran Ikan yang Didaratkan di PPN Pekalongan Tahun 2024	41
Tabel 17. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja di PPN Pekalongan Tahun 2015-2024	46
Tabel 18. Perkembangan Evaluasi Kinerja UPT PPN Pekalongan Tahun 2024	47
Tabel 19. Perkembangan Pelayanan SHTI di PPN Pekalongan Tahun 2024.	49
Tabel 20. Perkembangan Jumlah Logbook di PPN Pekalongan Tahun 2024.....	50
Tabel 21. Data Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Periode Tahun 2024.....	51

Tabel 22. Jumlah Dokumen Persetujuan Berlayar di PPN Pekalongan Tahun 2024.....	53
Tabel 23. Jumlah Dokumen STBLKK di PPN Pekalongan Tahun 2024.....	54
Tabel 24. Surat Masuk dan Keluar di PPN Pekalongan Tahun 2024	55
Tabel 25. Jumlah Tamu yang berkunjung ke PPN Pekalongan Tahun 2024	57
Tabel 26. Jumlah Kunjungan Bulanan Wisata Bahari PPN Pekalongan Tahun 2024	58
Tabel 27. Unggahan (<i>posting</i>) di Media Sosial PPN Pekalongan Tahun 2024.....	61
Tabel 28. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan I Tahun 2024	64
Tabel 29. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan II Tahun 2024.....	64
Tabel 30. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan III Tahun 2024	65
Tabel 31. Survey Kepuasan Masyarakat Tri Wulan IV Tahun 2024.....	65
Tabel 32. Rekapitulasi Pelaksanaan TCG RI-RRT oleh PPN Pekalongan	92
Tabel 33. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya	98
Tabel 34. Pemeliharaan/ Perawatan Sarana Operasional Pelabuhan	101

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pekalongan	11
Gambar 2. Kegiatan Hubungan Kelembagaan	16
Gambar 3. Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)	48
Gambar 4. Kegiatan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan.....	56
Gambar 5. Wisata Bahari Tahun PPN Pekalongan Tahun 2024	59
Gambar 6. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan	62
Gambar 7. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan & Keselamatan Kerja	63
Gambar 8. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi	67
Gambar 9. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan.....	70
Gambar 10. Kegiatan Patroli Dialogis dan Pengawasan Perlindungan Maritim di Kawasan PPN Pekalongan	72
Gambar 11. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan	77
Gambar 12. Sosialisasi Penanganan Kebakaran di Kawasan Pelabuhan	81
Gambar 13. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan.....	83
Gambar 14. Sosialisasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik	85
Gambar 15. Pertemuan dengan Pengguna Jasa terkait Fungsi Perusahaan di PPN Pekalongan.....	88
Gambar 16. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (tausiyah).....	89
Gambar 17. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di PPN Pekalongan.....	91
Gambar 18. Sosialisasi TCG RI-RRT	95
Gambar 19. Peninggian Dermaga Bongkar.....	96
Gambar 20. Peninggian Talud Wisata Bahari.....	97

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur”, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam mewujudkan visi tersebut, misi ke-7 berbunyi mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dimana salah satunya adalah dengan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Salah satu sumber kekayaan laut Indonesia yang melimpah adalah perikanan, terutama perikanan tangkap, yang potensi per tahunnya mencapai jutaan ton. Sejalan dengan hal tersebut, guna mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, dukungan sarana dan prasarana untuk pendaratan baik itu kapal penangkap maupun pengangkut ikan, yaitu Pelabuhan Perikanan, sangatlah penting.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan pada hakikatnya dilakukan dalam rangka pemusatan kegiatan perikanan, sehingga dapat dilakukan usaha perikanan pada skala ekonomi yang efisien, dan sekaligus memanfaatkan dampak kegiatan ekonomi yang terjadi didalamnya. Hakikat tersebut tercermin dari penyelenggaraan fungsi pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan, serta pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha. Hal ini disebabkan karena keberadaan pelabuhan perikanan membawa dampak ganda terhadap kegiatan usaha lain yang berbasis pada usaha penangkapan ikan maupun dalam bidang usaha lainnya. Dengan demikian, pembangunan pelabuhan perikanan dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi suatu wilayah.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tertuang bahwa visi KKP adalah terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian

berlandaskan gotong royong, yang dijabarkan dalam tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yaitu peningkatan daya saing, dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan, peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional, peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, turut bertanggung jawab memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan pembangunan KKP sebagaimana tersebut di atas.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, penyelenggaraan kegiatan di PPN Pekalongan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan kinerja. Penyusunan laporan dimaksud berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah/ lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah, atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

Laporan Tahunan ini menggambarkan capaian kinerja PPN Pekalongan selama tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PPN Pekalongan untuk meningkatkan kinerjanya kedepan.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang–undangan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan Operasional Pengelolaan PPN Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
11. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pedoman & Tata Cara Penanganan Ikan Hasil Tangkapan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan KKP;
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.08/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Harga Acuan Ikan.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi PPN Pekalongan adalah mendukung tercapainya visi Direktorat jenderal Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia yang Maju Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Misi PPN Pekalongan juga mengadopsi misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu melaksanakan 4 (empat) misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
 - Melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap
- b. Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing,
 - Melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap
- c. Misi 3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
 - Melalui Peningkatan Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Tangkap

- d. Misi 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Ditjen Perikanan
Tangkap

D. Tujuan Pelaporan

Penyusunan Laporan Tahunan 2024 ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan PPN Pekalongan dan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra PPN Pekalongan;
2. Sebagai bentuk akuntabilitas PPN Pekalongan selaku instansi pemerintah kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP dan pengguna jasa pelabuhan atau masyarakat perikanan lainnya.

E. Manfaat Pelaporan

Penyusunan Laporan Tahunan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui perkembangan capaian kinerja tahunan 2024 yang telah dilaksanakan PPN Pekalongan;
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Tahun 2024;
3. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan Tahun 2025;
4. Sebagai bentuk keterbukaan informasi selaku instansi pemerintah terhadap pengguna jasa pelabuhan atau masyarakat perikanan lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Laporan Tahunan 2024 ini :

1. BAB I. Pendahuluan;
Bab Pendahuluan memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Visi dan Misi, Tujuan Pelaporan, Manfaat Pelaporan, dan Sistematika Penulisan Laporan.
2. BAB II. Struktur dan Tata Kerja Organisasi;

Bab Struktur dan Tata Kerja Organisasi memuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Komposisi Pegawai, dan Hubungan Kelembagaan.

3. BAB III. Realisasi Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Pelabuhan;

Bab Realisasi Penyerapan Anggaran & Capaian Kinerja Pelabuhan memuat Alokasi Anggaran, Realisasi Penyerapan Anggaran, Perkembangan Penyerapan Anggaran, Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Capaian Kinerja Pelabuhan.

4. BAB IV. Keragaan Operasional;

Bab Keragaan Operasional memuat Produksi dan Harga Ikan; Musim Penangkapan Ikan; Daerah Penangkapan Ikan; Armada Perikanan; Jenis Ikan Hasil Tangkapan; Pemasaran dan Distribusi Ikan; Nelayan; Inspeksi Pengendalian Mutu; Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP); Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); *Logbook* Penangkapan Ikan; Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP); dan Operasional Kesyahbandaran.

5. BAB V. Keragaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan;

Bab Keragaan Pembangunan memuat Kegiatan Non Fisik, Kegiatan Fisik, dan Inventarisasi dan Investigasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan;

- Kegiatan Non Fisik memuat Persuratan dan Kearsipan; Kunjungan Tamu; Wisata Bahari; Pengelolaan Kehumasan; Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5); Survei Kepuasan Masyarakat; Diseminasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan, Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data *Logbook* Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan, Patroli Dialogis dan Pengawasan Perlindungan Maritim di Kawasan PPN Pekalongan, Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan PPN Pekalongan; Sosialisasi Penanganan Kebakaran di Kawasan Pelabuhan, Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015; Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik; Pertemuan dengan Pengguna Jasa Terkait Fungsi Pengusahaan di PPN Pekalongan; Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (Tausiyah); Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan Sosialisasi *Technical Cooperation Guidelines* (TCG) RRI-RRT;

- Kegiatan Fisik memuat Peninggian Dermaga Bongkar dan Peninggian Talud Wisata Bahari,
- Inventarisasi dan Investigasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan memuat Penyiapan Bahan Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan/Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya.

6. BAB VI. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya;

Bab VI Permasalahan dan Upaya Pemecahannya menjelaskan tentang kendala-kendala operasional PPN Pekalongan selama Tahun 2024 sekaligus upaya pemecahannya;

7. BAB VII. Penutup;

Bab VII Penutup menjelaskan Kesimpulan, Saran dan Kritik dari seluruh pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.

BAB II. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PPN Pekalongan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

1. Kedudukan

- a) Pelabuhan Perikanan adalah unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- b) Pelabuhan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- b. pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- e. pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;

- f. pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- g. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- j. pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- k. pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- m. pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- n. pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- o. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada pasal 12 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66/PERMEN-KP/2020, menyebutkan bahwa susunan organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara, terdiri atas:

1. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

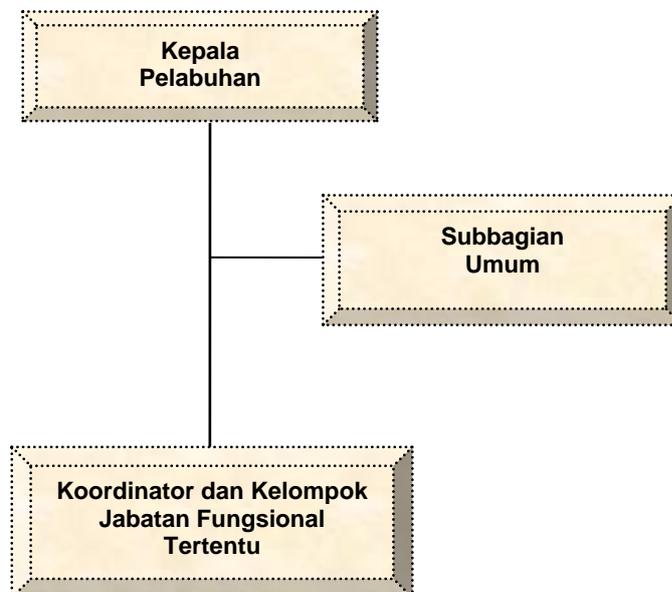
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

PPN Pekalongan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, dengan susunan organisasi terdiri atas :

Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Pekalongan



C. Komposisi Pegawai

Komposisi Pegawai PPN Pekalongan sampai dengan akhir tahun 2024 sebanyak 74 orang, terdiri dari 50 orang Pegawai Negeri Sipil, 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan 5 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Ketersediaan SDM dalam jumlah yang memadai serta memiliki komposisi masing-masing tugasnya diharapkan dapat memberikan pelayanan prima di Pelabuhan Perikanan. Berdasarkan rekapitulasi petugas kepegawaian komposisi pegawai berdasarkan golongan dan pendidikan di PPN Pekalongan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan

**Pegawai PPN Pekalongan
31 Desember 2024**

No	Jabatan	Golongan (PNS)					Golongan (PPPK)			Total	Pendidikan						Total
		I	II	III	IV	V	VII	IX	SD		SMP	SMA	D-3	D4	S1	S2	
1	Kepala Pelabuhan				1				1							1	1
2	Kepala Subbagian Umum			1					1					1			1
3	Syahbandar Pelabuhan Perikanan			5					5					4	1		5
4	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana			1					1						1		1
5	Pengelola Barang Milik Negara			2					2						2		2
6	Pengelola Data			1					1						1		1
7	Pengelola Kesyahbandaran			4					4			1			3		4
8	Pengelola Keuangan			2					2			1	1				2
9	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana		1	5					6		1	4			1		6
10	Pengolah Informasi Media			1					1						1		1
11	Pengolah Data dan Informasi			1					1				1				1
12	Sekretaris			1					1			1					1
13	Teknisi Sarana dan Prasarana		1						1			1					1
Sub Total		0	2	24	1				27	0	1	8	2	5	10	1	27
14	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda			1					1						1		1
15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama			1					1						1		1
16	Arsiparis Ahli Pertama							1	1						1		1
17	Arsiparis Pelaksana		1						1				1				1
18	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Mahir			4					4			3	1				4
19	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula					7			7			7					7

20	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil		3			2	5			1	4				5		
21	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda			4			4						2	2	4		
22	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama			5		6	11					6	5		11		
23	Pranata Humas Ahli Pertama					1	1						1		1		
24	Pranata Humas Pelaksana		1				1				1				1		
25	Pranata Keuangan APBN Penyelia			1			1						1		1		
26	Pranata Komputer Ahli Pertama					1	1						1		1		
27	Pranata Komputer Terampil					1	1				1				1		
28	Pranata SDM Aparatur Terampil		2				2				2				2		
Sub Total		0	7	16	0	7	3	9	42	0	0	11	7	6	13	2	42
JUMLAH		0	9	40	1	7	3	9	69	0	1	19	9	11	23	3	69
29	Pengemudi								1							1	
30	Pramubakti								0		3	1				4	
Sub Total		0	0	0	0				0	1	0	3	1	0	0	0	5
JUMLAH		0	9	40	1				69	1	1	22	10	11	23	3	74

Berdasarkan hasil rekapitulasi petugas kepegawaian selama tahun 2024, komposisi pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagaimana tercantum dalam tabel 2 di bawah ini. Sedangkan untuk penghargaan Satya Lencana Karya Satya tahun 2024, tidak ada pegawai yang mendapatkannya.

Tabel 2. Daftar Pegawai PPN Pekalongan yang memperoleh kenaikan pangkat

No	Nama / NIP	Pangkat	
		Lama	Baru
Periode Februari 2024			
1	Amin Syarifuddin 197511272007011002	Pengatur Tk.I II/d	Penata Muda III/a
2	Arribath Izzi 198901032008012001	Pengatur Tk.I III/d	Penata Muda III/a
3	Wildan Chusaeni Mustofa 199511182019021003	Pengatur Muda II/ a	Pengatur Muda Tk.I II/b
Periode April 2024			
1	Ardyando, S.Tr.Pi 198404232010122002	Penata Muda III/a	Penata Muda Tk.I III/b
2	Kartono, A.Pi., M.P. 197408071999031005	Pembina IV/a	Pembina Tk.I IV/b
3	Wahnoto 196711082007011002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pengatur II/c
Periode Agustus 2024			
1	Andreas Goenanta Singarimbun, A.Md. S.I. 199608192020121002	Pengatur II/a	Pengatur Tk.I II/d
2	Fieka Rakhmania, S.Pi., M.Pi. 198209102009122001	Penata III/c	Penata Tk.I III/d
3	Leily Safaria, S.Sos 198809142010122002	Penata III/c	Penata Tk I III/d
Periode Oktober 2024			
1	Deddy Kusuma, S.St.Pi 197905092006041003	Penata Muda Tk.I III/b	Penata III/c
2	Dewi Rahmadani, A.Md. 199708072020122001	Pengatur II/c	Pengatur Tk I II/d
3	Intan Rizkananda Wakhidahningrum, A.Md.I.Kom 199702012020122004	Pengatur II/c	Pengatur Tk.I II/d
Periode Desember 2024			
1	Suwarni 196612292002121002	Pengatur Tk I II/d	Penata Muda III/a

D. Hubungan Kelembagaan

Kegiatan operasional PPN Pekalongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perikanan dapat dilaksanakan secara optimal tidak lepas dari adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Tujuan dari hubungan kerja antarinstansi ini adalah dalam rangka mensinergikan program kegiatan yang berhubungan tugas pokok dan fungsi pelabuhan. Adapun instansi/organisasi yang bersinergi dilingkup kerja PPN Pekalongan antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan;
5. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan Kota Pekalongan;
7. Kantor Satuan Pengawasan SDKP Wilker Pekalongan;
8. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Wilker Pekalongan;
9. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan;
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekalongan;
11. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan;
12. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana;
13. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Semarang Wilker Pekalongan;
14. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan;
15. PT Perikanan Indonesia (Perindo) Cabang Pekalongan;
16. Pos TNI Angkatan Laut Pekalongan Kota;
17. Satuan Polisi Air dan Udara Polres Pekalongan Kota;
18. Kapal Pengawas Ditpolairud Polda Jawa Tengah;
19. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan;
20. UPTD Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan;
21. KUD Makaryo Mino Kota Pekalongan;
22. Himpunan Pedagang Ikan Pekalongan (HPIP) Kota Pekalongan;
23. Persatuan Bakul Ikan (PBI) Kota Pekalongan;

24. Himpunan Pemilik Kapal Perikanan Pekalongan (HPKPP);
25. Asosiasi Purse Seine Indonesia (API) Kota Pekalongan;
26. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Kota Pekalongan;
27. Serikat Pekerja TPI Kota Pekalongan;
28. Bank BRI Cabang Pekalongan.

Sebagai wujud dari pelaksanaan koordinasi antarinstansi, PPN Pekalongan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan kegiatan outdoor seperti senam pagi bersama, kerja bakti, dan siraman rohani/pengajian.

Gambar 2. Kegiatan Hubungan Kelembagaan



BAB III. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN & CAPAIAN KINERJA PELABUHAN

A. Alokasi Anggaran

Dukungan anggaran untuk pembangunan PPN Pekalongan pada tahun 2024 berjumlah **Rp.13.927.171.000,-** yang merupakan pagu awal tanggal 24 November 2023. Kemudian dilakukan Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir), yang merupakan Revisi I pada tanggal 29 Januari 2024. Namun demikian hal itu tidak mengurangi jumlah anggaran.

Dalam perkembangannya, sampai dengan Revisi ke VIII pada tanggal 21 Oktober 2024 anggaran PPN Pekalongan tidak berubah. Namun demikian, pada Revisi ke IX tanggal 6 November 2024, anggaran mengalami kenaikan sebesar **Rp.1.540.000.000,-** sehingga nilainya menjadi **Rp.15.467.171.000,-** yang merupakan penambahan anggaran Belanja Pegawai, karena ada penambahan pegawai di PPN Pekalongan sebanyak 9 orang. Pada Bulan Desember 2024, dilakukan blokir anggaran sebesar **Rp 336.629.000,-** sehingga anggaran final sebesar **Rp 15.130.542.000,-**

Adapun Rincian Revisi DIPA Tahun 2024 PPN Pekalongan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. Revisi DIPA PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2024

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Jenis Revisi
		Nomor	Tanggal			
0	Awal			24/11/2023	Rp.13.927.171.000,-	
1	Revisi 1	B.88/DJPT/RC.420/I/2024 (DJA)		29/01/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Jenis Revisi
		Nomor	Tanggal			
2	Revisi 2	147/PPN.PKL/KPA/RC-420/II/2024 (Satker)	05/02/2024	07/02/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pemenuhan Belanja Operasional
3	Revisi 3	508/PPN.PKL/KPA/RC-420/IV/2024 (Satker)	22/04/2024	23/04/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4	Revisi 4	707/PPN.PKL/KPA/RC.420/V/2024 (Kanwil Semarang)	3/005/2024	01/06/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5	Revisi 5	934/PPN.PKL/KPA/RC.420/VII/2024 (Kanwil Semarang)	11/07/2024	12/07/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Jenis Revisi
		Nomor	Tanggal			
						Penerimaan dalam Halaman III DIPA Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
6	Revisi 6	1207/PPN.PKL/KPA/RC.420/IX/2024 (Satker)	10/09/2024	10/09/2024	Rp.13.927.171.000,-	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atas Revisi Anggaran
7	Revisi 7	B.1275/DJPT/RC.420/X/2024 (DJA)	30/10/2024	12/10/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pemenuhan Belanja Operasional Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional Pergeseran

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Jenis Revisi
		Nomor	Tanggal			
						Anggaran terkait Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat /Pemerintah Daerah (Akun 526) Pergeseran Anggaran Antar-Unit Eselon I Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
8	Revisi 8	B.2396/PPN.PKL/KPA/R C.420/X/2024 (Kanwil Semarang)	10/10/2024	21/10/2024	Rp.13.927.171.000,-	Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

NO.	DIPA	Surat Usulan		Tanggal Pengesahan DIPA	Pagu	Jenis Revisi
		Nomor	Tanggal			
9	Revisi 9	B.641/PPN.PKL/RC.420/X/2024 (Satker)	21/10/2024	06/11/2024	Rp.15.467.171.000,-	Revisi melalui Eselon I
10	Revisi 10	B.723/PPN.PKL/RC.420/XI/2024 (Satker)	29/11/2024	29/11/2024	Rp.15.467.171.000,-	Pemutakhiran POK
11	Revisi 11	727/PPN.PKL/RC.420/XI I/2024 (Satker)	02/12/2024	02/12/2024	Rp.15.467.171.000,-	Pemutakhiran data ROK Bulan Desember 2024
12	Revisi 12	B.786/PPN.PKL/RC.420/XII/2024 (Satker)	12/12/2024	12/12/2024	Rp.15.467.171.000,-	Pemutakhiran data ROK Bulan Desember 2024
13	Revisi 13	B.792/PPN.PKL/RC.420/XII/2024 (Satker)	24/12/2023	24/12/2024	Rp.15.467.171.000,-	Pemutakhiran POK
14	Revisi 14	B.802/PPN.PKL/RC.420/XII/2024 (Satker)	30/12/2023	30/12/2024	Rp.15.467.171.000,-	Pemutakhiran POK Bulan Desember 2024
15	Pemblokiran Anggaran				Rp 15.130.542.000,-	Dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 336.629.000,-

Perkembangan pagu sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	58.000.000
2.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.905.132.000
3.	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000
4.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	41.885.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.121.525.000
	TOTAL	15.130.542.000,-

B. Realisasi Penyerapan Anggaran

Dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.15.130.542.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp.14.877.829.141,-** atau mencapai 98,33 % pada akhir tahun 2024. Secara kinerja, PPN Pekalongan mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **117,54 %** dengan penjabarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS)

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TW-IV		Capaian (%)
					TARGET	CAPAIAN	
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	IKS.01.1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan NusantaraPekalongan. (Rp. Juta)	1.013,27	1.013,27	1.353,86	120
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Meningkatkan	IKS.02.1	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.(Ton)	13.119	13.119	13.121,23	120
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang Berdaya saing	IKS.03.1	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	100	100	100	100
		IKS.03.2	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	84	84	98,25	116,96

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TW-IV		Capaian (%)
					TARGET	CAPAIAN	
		IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	55	55	68,87	120
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang optimal	IKS.04.1	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusnatara Pekalongan. (Persen)	80	80	100	120
		IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	30,10	30,10	90,29	120
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pekalongan	IKS.05.1	Kapal Perikanan Izin daerah yang memenuhi ketentuan. (Kapal)	268	268	416	120
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Pekalongan	IKS.06.1	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan. (Persen)	6	6	16,36	120
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan	IKS.07.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	80	80	81,33	101,66
		IKS.07.2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	80	80	93,33	116,66
		IKS.07.3	Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	94	94	97,91	104,16
		IKS.07.4	IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Indeks)	84	84	85,86	102,21
		IKS.07.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	80	80	96,29	120
		IKS.07.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	80	80	90	112,50
		IKS.07.7	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	93,76	93,76	97,04	103,50
		IKS.07.8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara	71	71	90	120

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TW-IV		Capaian (%)
					TARGET	CAPAIAN	
			Pekalongan. (Nilai)				
		IKS.07.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Indeks)	88,30	88,30	89,13	100,93

Secara umum skor kinerja adalah 117,54, yang didukung pencapaian target indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih oleh seluruh indikator kinerja. 6 indikator kinerja memperoleh predikat baik, yaitu :

1. Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
2. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
3. Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
4. IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
5. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

Sedangkan 12 indikator kinerja memperoleh predikat istimewa, yaitu :

1. Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
3. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
4. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
5. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
6. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
7. Kapal Perikanan Izin daerah yang memenuhi ketentuan;
8. Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan;
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;

10. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
11. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan;
12. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

C. Perkembangan Penyerapan Anggaran

Realisasi keuangan PPN Pekalongan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai **98,33%**. Jika dibandingkan dengan realisasi keuangan tahun sebelumnya, memang terjadi penurunan, dimana realisasi tahun 2023 mencapai 99,30%. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional, sehingga berpengaruh pada tidak optimalnya pelaksanaan yang berasal dari PNBP fungsional. Namun demikian, realisasi fisik bisa tercapai 100%, yang berarti mengindikasikan adanya efisiensi anggaran di PPN Pekalongan.

D. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam pelaksanaannya sebagai instansi pemerintah, selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, PPN Pekalongan juga melaksanakan fungsi perusahaan. Dalam hal pelaksanaan fungsi perusahaan tersebut, PPN Pekalongan memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap jenis layanan tertentu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Adapun Objek/Ruang Lingkup PNBP tersebut meliputi: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi). Jenis PNBP yang dipungut oleh PPN

Pekalongan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: PNBPN Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan Pascaproduksi, dan PNBPN Non SDA Perikanan.

1. PNBPN SDA Perikanan Pascaproduksi

Seiring dengan penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pada tahun 2023, maka mekanisme pemungutan PNBPN subsektor perikanan tangkap yang sebelumnya praproduksi berubah menjadi pascaproduksi.

Terkait dengan hal ini, pada tahun 2024, PPN Pekalongan menjadi koordinator untuk pelaksanaan pemungutan PNBPN SDA Perikanan Pascaproduksi di 5 (lima) pelabuhan, yaitu di PPN Pekalongan, PPP Tegalsari (Kota Tegal), PPP Klidang Lor (Kabupaten Batang), PP Kluwut (Kabupaten Brebes), dan PPP Asemtoyong (Kabupaten Pemalang). Adapun capaian PNBPN SDA Perikanan Pascaproduksi sampai dengan akhir tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian PNBPN SDA Perikanan Pascaproduksi Tahun 2024

Uraian	PPN Tegalsari	PPN Pekalongan	PP Kluwut	PPP Klidang Lor	PPP Asemtoyong
Capaian (%)	49,61	25,63	126,97	54,75	0,00
Target (Rp)	201.933.629.457	29.729.520.250	10.209.059.648	5.143.982.525	17.827.800
Januari	11.053.592.355	498.265.325	1.474.187.674	186.508.503	0
Februari	7.973.259.885	257.949.532	1.125.063.457	131.485.249	0
Maret	8.024.787.598	359.002.535	822.661.440	191.782.077	0
April	8.485.955.478	639.068.488	1.586.827.704	274.143.794	0
Mei	2.321.553.934	730.416.160	376.489.651	135.433.333	0
Juni	4.034.560.771	279.020.237	426.114.025	153.593.011	0
Juli	10.139.928.150	744.348.563	1.407.082.244	188.991.130	0
Agustus	5.193.708.360	784.745.372	745.010.841	208.566.358	0
September	7.820.106.561	747.131.888	953.893.994	260.634.936	0
Oktober	11.468.593.112	748.563.451	1.865.379.707	217.454.222	0
November	8.846.299.777	604.046.859	715.012.397	271.873.593	0
Desember	14.396.825.478	1.184.091.079	1.396.398.405	595.836.947	0
LPM					
Pending	412.816.012	42.543.405	67.932.663	0	0
Jumlah	100.171.987.471	7.619.192.894	12.962.054.202	2.816.303.153	0

2. PNBPN Non SDA Perikanan

Penerimaan PNBPN Non SDA Perikanan bersumber dari layanan berbayar yang diselenggarakan oleh PPN Pekalongan, yaitu: pas masuk TPI, jasa tambat labuh, pas masuk Wisata Bahari, tiket masuk akuarium, tiket masuk wahana edukasi air (kolam renang), sewa

rumah dinas, sewa kantin Wisata Bahari, dan sewa alat berat (forklift). Perhitungan penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Pekalongan merupakan nilai PNBPN non SDA dari subsektor perikanan tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Adapun capaian PNBPN Non SDA Perikanan Tahun 2024 di PPN Pekalongan pada setiap bulannya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 7. Capaian PNBPN Non SDA Perikanan Tahun 2024 di PPN Pekalongan

2024	PNBP	Target	Realisasi	%
Januari	11.21%	113,542,634	152,939,992	134.70%
Februari	8.34%	84,474,000	54,951,273	65.05%
Maret	8.90%	90,181,148	71,284,952	79.05%
April	12.43%	125,931,539	65,613,805	52.10%
Mei	10.55%	106,849,793	136,005,949	127.29%
Juni	6.63%	67,141,090	142,780,996	212.66%
Juli	4.23%	42,855,388	117,664,153	274.56%
Agustus	8.93%	90,472,486	74,959,640	82.85%
September	8.11%	82,139,493	375,466,311	457.11%
Oktober	5.29%	53,569,235	93,782,283	175.07%
Nopember	7.89%	79,937,197	38,631,285	48.33%
Desember	7.52%	76,176,997	29,783,919	39.10%
	100.00%	1,013,271,000	1,353,864,558	133.61%

Sampai dengan Tahun 2024, penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Pekalongan mencapai Rp 1.353.864.558,- dari target sebesar Rp 1.013.271.000,- atau secara persentase capaian sebesar 133,61 %. Realisasi penerimaan PNBPN Non SDA diperoleh dari:

- 1) penerimaan fungsional yang terdiri dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana serta;
- 2) penerimaan umum.

Capaian PNBPN Non SDA di PPN Pekalongan sampai dengan Triwulan IV mencapai Rp 1.353.864.558,- diperoleh dari penghapusan aset dengan cara penjualan serta peningkatan penggunaan fasilitas pelabuhan untuk tambat labuh. Meski target PNBPN non SDA ini tercapai, masih terdapat faktor penghambat berupa terdapat pendangkalan sungai yang mengakibatkan kapal tidak bongkar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan,

dan perbedaan Harga Acuan Ikan (HAI) di PPN Pekalongan dengan pelabuhan pangkalan sekitar yang cukup tinggi. Sehingga, kapal perikanan lebih banyak yang membongkar muatannya dan melakukan tambat labuh di Pelabuhan pangkalan lain.

Faktor penghambat tersebut sementara dapat diatasi dengan pengerukan oleh excavator dan ponton secara rutin, serta mengusulkan ke KKP agar perbedaan HAI di pelabuhan pangkalan yang lokasinya masih berdekatan tidak terlalu besar.

E. Capaian Kinerja Pelabuhan

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan PPN Pekalongan diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) Sasaran Strategis (SS). Pencapaian Indikator Kinerja PPN Pekalongan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Pekalongan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW 4 2024	REALISASI TW 4 2024	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan NusantaraPekalongan. (Rp. Juta)	1.013,27	1.013,27	1.353,86	120
2	Produktivitas Perikanan Tangkap diPelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Meningkat	2 Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.(Ton)	13.119	13.119	13.121,23	120
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang Berdaya saing	3 Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	100	100	100	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	84	84	98,25	116,46
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	55	55	68,87	120
4	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang optimal	6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusnatara Pekalongan. (Persen)	80	80	100	120
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	30,10	30,10	90,29	120

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	TARGET TW 4 2024	REALISASI TW 4 2024	PERSENTASE CAPAIAN (%)
		Nusantara Pekalongan. (Nilai)				
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPN Pekalongan	8 Kapal Perikanan Izin daerah yang memenuhi ketentuan. (Kapal)	268	268	416	120
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di PPN Pekalongan	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan. (Persen)	6	6	16,36	120
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan PPN Pekalongan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	80	80	81,33	101,66
		11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	80	80	93,33	116,66
		12 Nilai rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	94	94	97,91	104,16
		13 IP ASN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Indeks)	84	84	85,86	102,21
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	80	80	96,29	120
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Persen)	80	80	90	112,50
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	93,76	93,76	97,04	103,50
		17 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Nilai)	71	71	90	120
		18 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. (Indeks)	88,30	88,30	90,55	102,55

Meskipun semua target IKU pada tahun 2024 tercapai, namun demikian ada 2 (dua) IKU yang proses pencapaiannya cukup berat yaitu pencapaian volume produksi perikanan dan IP

ASN PPN Pekalongan. masih terdapat banyak pegawai dengan kategori sangat rendah yang mempengaruhi nilai IP ASN PPN Pekalongan. Untuk volume produksi perikanan, sulitnya pencapaian target disebabkan karena semakin sedikitnya kapal yang melakukan pembongkaran di PPN Pekalongan. Sedangkan terkait IP ASN, hal ini dikarenakan masih banyak pegawai yang belum mengikuti kegiatan seminar, bimtek, maupun sosialisasi selama 2024 serta belum dilaksanakannya Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).

Sehingga, kedepannya diharapkan agar tetap dilakukan optimalisasi usaha-usaha berupa inovasi kegiatan-kegiatan baru maupun peningkatan kreativitas kegiatan-kegiatan yang ada agar capaian di tahun berikutnya dipertahankan bahkan ditingkatkan.

BAB IV. KERAGAAN OPERASIONAL

A. Produksi dan Harga Ikan

Volume pendaratan ikan di PPN Pekalongan tahun 2024 sebesar 13.121.233 dengan nilai produksi mencapai Rp. 206.907.639.156,-. Volume produksi perikanan tangkap pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yakni sebesar 3,01% dan diikuti dengan penurunan nilai produksi sebesar 13,2% . Rata-rata produksi ikan yang didaratkan setiap harinya sekitar 35,85 ton dengan harga rata-rata mencapai Rp. 15.768,92,-/kg atau dengan kata lain harga rata-rata menurun 15,7% dibandingkan tahun yang lalu.

Ikan yang didaratkan kondisinya 75,27% merupakan ikan beku dan 24,73% merupakan ikan segar. Hal tersebut sebagai akibat sudah semakin banyaknya kapal yang menggunakan alat bantu berupa refrigerator untuk menyimpan hasil tangkapan karena trip penangkapan yang cukup panjang. Selain itu, cukup banyak kapal yang beroperasi di WPP-NRI 713, 718, 572 dan 573 yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan sehingga membutuhkan media penyimpanan alat pembeku (freezer). Meskipun ikan didaratkan dalam kondisi beku, namun kualitas ikan yang didaratkan tetap bagus, hal ini yang akan mempengaruhi harga ikan yang semakin tinggi pula. Waktu penangkapan dengan menggunakan alat pembeku bisa lebih lama dilaut, sedangkan yang menggunakan es apabila es habis akan segera mendaratkan ikannya.

Tabel 9. Perkembangan Jumlah Produksi & Nilai Produksi di PPN Pekalongan Tahun 2015-2024

No	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp. 000)	Harga Rata2/Kg (Rp)	Produksi Rata2/hari (Ton)
1	2015	17.597,94	205.211.125,14	11.661,09	48,21
2	2016	19.684,75	255.219.047,00	12.965,32	53,93
3	2017	12.847,94	211.834.156,00	16.487,80	35,20
4	2018	12.815,64	199.088.760,60	15.534,83	35,11
5	2019	13.490,11	175.902.795,00	13.039,39	36,96
6	2020	16.157,23	231.676.798,00	14.338,89	44,27
7	2021	12.653,53	214.657.679,00	16.964,25	34,67
8	2022	13.943,00	247.948.913,00	17.783,04	38,20
9	2023	12.736,69	238.427.251,77	18.719,72	34,90
10	2024	13.121,23	206.907.639,16	15.768,92	35,85
	R (%)	-1,38%	1,14%	3,56%	-1,41%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata produksi selama 10 tahun mengalami penurunan sebesar 1,38% namun harga jual ikan menunjukkan adanya kenaikan sebesar 3,56%, hal ini terlihat dari nilai produksi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.14%. Hal ini dipengaruhi adanya peningkatan kualitas produksi yang didaratkan di PPN Pekalongan setiap tahunnya dan daya beli masyarakat terhadap ikan meningkat.

B. Musim Penangkapan Ikan

Musim penangkapan ikan di PPN Pekalongan dibagi menjadi dua kelompok. Musim paceklik (tidak musim ikan) biasa terjadi di Triwulan kesatu (1) dan ketiga (3) sedangkan di Triwulan kedua (2) dan empat (4) adalah puncak pendaratan ikan. Pengaruh cuaca El Nino yang menyebabkan kondisi basah atau musim hujan yang lebih panjang. Dampak dari curah hujan yang panjang menyebabkan salinitas air laut menjadi menurun diatas 30 ppm. Demikian juga kondisi air laut yang menerima sinar matahari yang lebih lama menyebabkan aktifitas fotosintesa plankton menjadi meningkat yang berpengaruh kepada kesuburan di perairan laut. Meningkatnya kesuburan perairan berpengaruh juga terhadap sumber daya perikanan dengan banyaknya ikan yang bisa ditangkap.

Terjadinya perubahan daerah yang semula di WPP 713 menjadi WPP 718, 572, 573 maka kapal yang melakukan area penangkapan di WPP 718, 572, 573 cenderung mendaratkan ikan di daerah pelabuhan terdekat seperti di PPN Tual atau di Pelabuhan Umum Dobo. Selain di pelabuhan tersebut, ada kecenderungan akan mendaratkan ikan pada pelabuhan pangkalan sesuai dengan izin yang tertera pada SIPI. Dengan adanya izin pelabuhan pangkalan lebih dari satu dan berlaku untuk area penangkapan di WPPNRI, maka ada kecenderungan kapal-kapal yang berdomisili di PPN Pekalongan akan mendaratkan ikan di luar PPN Pekalongan.

Di tahun 2024 jumlah kapal yang mendaratkan khususnya kapal yang berukuran <10 GT mengalami penurunan 27,7% namun kapal 10-30GT mengalami kenaikan sebanyak 11,9% dari tahun 2024. Pada tahun 2024 kapal-kapal dibawah 30 GT yang beroperasi di WPP712 dengan izin pusat (migrasi) mengalami kenaikan didominasi kapal dengan alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal dan alat tangkap Jala Jatuh Berkapal dengan sasaran utama cumi-cumi. Frekuensi kedatangan kapal berukuran 50-100 GT mengalami penurunan 37,5% dari tahun 2024 dikarenakan banyaknya kapal yang mendaratkan ikan diluar PPN Pekalongan sesuai dengan SIPI yang boleh mencantumkan dua pelabuhan pangkalan. Sedangkan kapal >100 GT mengalami

kenaikan sebanyak 13% dari tahun 2024. Hal ini dikarenakan banyak kapal yang beroperasi di WPP 713, 718, 572 dan 573 yang mengirimkan hasil tangkapan dan pulang tetap membawa ikannya pada trip terakhir. Kapal <30 GT tersebut tidak melakukan operasi penangkapan sepanjang bulan hanya antara sepuluh sampai lima belas hari dalam setiap bulannya (musim petengan/ gelap bulan) mereka beroperasi di Laut Jawa dan mendaratkan hasil tangkapannya di PPN Pekalongan. Kapal yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan masih di dominasi oleh kapal >30GT dengan alat tangkap Purse Sein dan Jaring Insang, sedangkan kapal <30 GT didominasi oleh kapal-kapal Bubu, Payang, Jaring Insang Hanyut.

Tabel 10. Perkembangan Armada Perikanan PPN Pekalongan Tahun 2015-2024

No.	Tahun	Jumlah	< 10 GT	10 - 30 GT	30 - 50 GT	51 - 100 GT	100 - 200 GT
	Years	Total					
1	2015	434	82	116	42	125	69
2	2016	302	39	126	8	98	31
3	2017	410	214	112	3	71	10
4	2018	301	151	62	16	58	14
5	2019	541	201	77	32	97	134
6	2020	566	228	90	2	100	146
7	2021	552	221	89	4	86	152
8	2022	458	180	83	9	139	47
9	2023	430	198	109	5	72	46
10	2024	365	143	122	3	45	52
R (%)		2%	42%	3%	49%	-4%	81%

C. Daerah Penangkapan Ikan

Pada tahun 2024 daerah penangkapan kapal perikanan sebagian besar berada di WPP 712 dengan jumlah 95,24%, WPP 713 sebanyak 3,53% dan WPP 573, 572, dan 718 dibawah 1% dari jumlah total trip kapal yang beroperasi sebanyak 5.068 kali trip.

Kapal yang beroperasi di WPP 713, 718, 572, 573 lama hari dilaut berkisar 50 hari s.d. 180 hari dan didominasi oleh kapal yang berukuran >30 GT dengan alat tangkap Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal (*Purse Seine*), sedangkan kapal yang beroperasi di WPP 712 lama hari operasi berkisar 3 hari s/d 15 hari dan dilakukan oleh kapal yang berukuran <30 GT yang didominasi oleh kapal Purse Seine dan Jaring Insang Hanyut. Sedangkan kapal yang berukuran <5 GT berasal dari kapal yang menggunakan jaring arad, bubu dan jaring insang dan beroperasi *one day fishing*.

Tabel 11. Perkembangan Daerah Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan Tahun 2024

BULAN	WPP					Grand Total
	572	573	712	713	718	
JANUARI		2	316	14		332
FEBRUARI			223	14	1	238
MARET			632	6	5	643
APRIL		10	371	4	2	387
MEI	1	1	522	3		527
JUNI	2	1	387	8	5	403
JULI	1	2	421	22	3	449
AGUSTUS		5	387	22		414
SEPTEMBER	1	5	484	28	2	520
OKTOBER		2	564	22		588
NOVEMBER	-	4	403	15		422
DESEMBER	0	6	117	21	1	145
Grand Total	5	38	4,827	179	19	5,068
	0.10%	0.75%	95.24%	3.53%	0.37%	

D. Armada Perikanan

Jumlah kapal yang aktif beroperasi di tahun 2024 sebanyak 365 unit kapal. Terdapat penurunan jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan sebanyak 20,82% dari tahun 2023. Dari seluruh kapal aktif di tahun 2024 terdiri dari 22,19% kapal Purse Seine >30GT, Kapal Purse Seine Mini pada kapal <30GT sebanyak 23,56%, kapal-kapal <30 GT didominasi sebanyak 6,85% kapal tangkap Jaring Insang Hanyut dan 19,18% kapal dengan alat tangkap Bubu, dan sisanya kapal <30 GT dengan alat tangkap Bouke Ami, Jala Jatuh Berkapal dan Kapal Angkut, sedangkan kapal <5GT didominasi oleh kapal dengan alat tangkap Payang dimana alat tangkap telang di modifikasi menjadi alat tangkap yang masuk kedalam jenis Pukat Hela. Dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan jumlah trip namun jumlah kapal yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan mengalami penurunan.

Tabel 12. Perkembangan armada perikanan berdasarkan Alat Tangkap yang digunakan di PPN Pekalongan Tahun 2015 - 2024

No.	Tahun	Jumlah	Pukat Cincin > 30 GT	Pukat Cincin < 30 GT	Jaring Insang tetap	Jaring Insang Lingkar	Payang	Bubu	Lainnya
	Years	Total	Purse Seine > 30 GT	Small Purse Seine < 30 GT	Set Gill Net	Encircling Gill Net	Danish Seine	Trap	Others
1	2015	369	198	146	25	0	0	0	0
2	2016	302	133	111	47	0	0	0	11
3	2017	410	84	91	48	23	56	31	77
4	2018	301	74	42	48	25	42	66	4
5	2019	541	196	51	103	20	57	50	64
6	2020	556	131	150	57	18	95	67	38
7	2021	552	205	67	119	17	50	42	52
8	2022	376	90	58	46	19	71	55	37
9	2023	461	130	66	51	20	95	55	44
10	2024	365	81	86	0	25	54	70	49
R (%)		43%	91%	68%	207%	-6%	100%	120%	1993%

Tabel 13. Perkembangan Jumlah Trip Kapal dan Kapal Bongkar di PPN Pekalongan Tahun 2023– 2024

No.	Bulan	Jumlah Trip Kapal		Jumlah Kapal Bongkar (Kali)	
		2023	2024	2023	2024
1	Januari	107	332	111	332
2	Februari	258	238	263	238
3	Maret	365	643	367	643
4	April	237	387	238	387
5	Mei	510	527	511	527
6	Juni	359	403	362	403
7	Juli	299	449	299	449
8	Agustus	333	414	333	414
9	September	506	520	506	520
10	Oktober	409	588	409	588
11	November	761	422	765	422
12	Desember	514	145	521	145
Jumlah		4658	5068	4685	5068

Bila dilihat dari jumlah trip kedatangan kapal di PPN Pekalongan pada tahun 2024 sejumlah 5068 kali trip, hal ini tentu saja mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 9% dengan jumlah mendaratkan ikan sebanyak 5068 kali. Dominasi kapal yang mendaratkan ikan pada tahun 2024 adalah kapal <5GT dengan alat tangkap Pukat Hela sebanyak 1906 kali, kemudian Bubu sebanyak 1142 kali dengan area penangkapan di WPPNRI 712. Sedangkan kapal >30GT yang didominasi oleh alat tangkap Hand Line Tuna, Jala Jatuh Berkapal, Pukat Cincin Pelagis Besar dan Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan daerah penangkapan ikan di WPPNRI 713, 572, 573 dan 718. Berikut perkembangan jumlah trip kapal bongkar di PPN Pekalongan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 14. Perkembangan Jumlah Trip Kapal dan Kapal Bongkar di PPN Pekalongan Tahun 2024

TRIP (Kali)	Alat Penangkapan Ikan										
	Bouke Ami	Bubu	Hand Line Tuna	Jaring Insang Hanyut	Jala jatuh Berkapal	Pancing Cumi	Pukat Cincin Pelagis Besar	Pukat Cincin Pelagis Kecil	Pukat Hela	Payang	Total
1. JANUARI		104		55	2			34	4	133	332
2. FEBRUARI		93		18				19	108		238
3. MARET		407		26	1	1		21	187		643
4. APRIL		120	3	34			1	59	170		387
5. MEI	1	138		78	3		1	73	233		527
6. JUNI		20		69	9		1	148	156		403
7. JULI		37	1	89	8		0	125	189		449
8. AGUSTUS		47	1	69	4		2	116	175		414
9. SEPTEMBER		108		56	8		4	153	191		520
10. OKTOBER		68		78	2			188	252		588
11. NOVEMBER				75	8		2	148	189		422
12. DESEMBER	-		1	44	9		1	38	52		145
Total	1	1,142	6	691	54	1	12	1,122	1,906	133	5,068

E. Jenis Ikan Hasil Tangkapan

Dari jenis ikan yang didaratkan sebanyak 13.121.233 kg sebesar 90,94% adalah ikan pelagis, 4,74% adalah ikan demersal, 3,53% binatang lunak dan sisanya binatang karang, binatang berkulit keras dan binatang air lainnya. Jumlah ikan pelagis yang didaratkan di PPN Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2023, dikarenakan bertambahnya jumlah armada kapal dengan alat tangkap Jala Jatuh Berkapal dan Bouke Ami yang mendaratkan tangkapan utamanya yaitu cumi-cumi

(binatang lunak) di PPN Pekalongan. Dari total ikan yang didaratkan didominasi oleh ikan Layang Deles, ikan Layang Benggol, ikan Lemuru Jawa (Siro), ikan Tongkol Abu-abu dan ikan Cakalang serta ikan demersal yang tertangkap umumnya jenis ikan bawal hitam, manyung, swanggi, rajungan dan kuwe sedangkan cumi-cumi adalah jenis binatang lunak.

Ikan pelagis umumnya ditangkap dengan alat tangkap Pukat Cincin, sedangkan ikan pelagis besar sebagian ada yang ditangkap dengan alat tangkap Jaring Insang Lingkar. Adapun Jenis ikan demersal umumnya ditangkap oleh Jaring Insang Tetap dan Bubu. Sedangkan binatang lunak ditangkap dengan Jala Jatuh Berkapal, Pancing Cumi dan Bouke Ami.

Tabel 15. Perkembangan Volume, Nilai dan Harga rata-rata Ikan Hasil Tangkapan di PPN Pekalongan Tahun 2024

<i>Klasifikasi Jenis Ikan</i>	<i>Spesies Ikan</i>	<i>Total Volume (Kg)</i>	<i>Total Nilai Produksi (Rp)</i>	<i>Harga Rata-Rata (Rp)</i>
Binatang Air Lainnya	Teripang	9,430	125,324,000	13,048
Binatang Air Lainnya Total		9,430	125,324,000	13,048
Binatang Berkulit Keras	Kepiting	4,601	244,964,516	48,918
	Rajungan [Scd]	47,257	2,483,354,855	48,460
	Udang Dogol	22,437	813,808,000	36,310
	Udang Jerbung	4,433	360,203,000	82,591
	Udang Krosok	16,195	215,037,500	13,051
Binatang Berkulit Keras Total		94,923	4,117,367,871	45,263
Binatang Lunak	Cumi-Cumi	453,333	15,889,177,058	34,797
	Gurita	77	1,535,000	20,000
	Kerang Darah	1,679	14,912,000	8,583
	Simping	2,647	20,759,000	8,733
	Sotong	4,948	184,189,000	37,889
Binatang Lunak Total		462,684	16,110,572,058	32,537
Ikan Demersal	Alu-Alu	47,313	856,893,000	18,512
	Bawal Hitam	257,485	7,440,614,244	33,410
	Bawal Putih	17	1,080,000	58,857
	Beloso	7,279	64,806,000	10,412
	Gabus	336	5,858,000	14,417
	Gerot-Gerot	56	575,000	8,769
	Golok-Golok	2,276	17,969,000	8,199
	Ikan Ayam-Ayam	2,422	7,265,000	10,245
	Ikan Lidah	237	2,687,000	10,859

	Ikan Sebelah	2,109	42,315,000	18,768
	Kakap	17,793	727,543,420	30,063
	Kakap Batu	3,001	72,034,000	23,636
	Kakap Hitam	199	4,643,000	30,953
	Kakap Jenaha	3,250	80,828,000	35,996
	Kakap Merah	6,468	272,761,000	44,871
	Kerong-Kerong	1,538	5,220,000	3,276
	Kuniran	10,906	70,733,000	45,397
	Kurau; Kuro [Fot]	7,087	197,382,336	27,425
	Kurisi	20,536	87,322,500	3,472
	Kwe Selar	5,757	267,340,000	24,844
	Kwee	18,078	374,205,000	22,323
	Layur [Svh]	46,048	543,304,000	11,046
	Lencam	8,489	102,318,000	16,400
	Manyung	57,584	1,227,111,804	61,959
	Manyung , Jahan [Aux]	6,375	50,653,000	12,620
	Pari Kekeh	2,558	53,654,000	19,785
	Pari Kelapa	5,687	93,364,000	15,071
	Pari Kembang; Pare Kembang	4,524	50,878,000	14,431
	Peperek	21,152	92,434,000	3,548
	Remang	2,484	40,004,169	14,572
	Sembilang	5,068	89,377,000	17,136
	Silper	116	1,480,000	13,874
	Swanggi	36,155	247,026,000	7,853
	Tigawaja	7,532	112,151,150	14,488
	Ikan Demersal Total	617,915	13,303,829,623	18,028
	Ikan Demersal Lainnya			
	Bawal Jenggot	480	2,300,000	4,792
	Ikan Jaket	38	145,000	10,278
	Kaci-Kaci	739	16,549,000	22,379
	Pari Macan	91	955,000	10,308
	Ikan Demersal Lainnya Total	1,348	19,949,000	19,382
	Ikan Karang			
	Ekor Kuning	375	10,420,000	18,306
	Kerapu	242	6,891,000	27,948
	Kerapu Balong	521	11,821,000	27,469
	Kerapu Lumpur; Babunyai; Kerapu; Babunjai	1,001	13,488,190	13,326
	Ikan Karang Total	2,139	42,620,190	22,412
	Ikan Pelagis Besar			
	Cakalang [Skj]	2,248,376	47,038,896,700	20,713

	Cucut Lanjam	8,865	95,904,000	14,660
	Gindara	5	110,000	22,000
	Hiu Pilus	21,319	215,363,000	11,221
	Ikan Layaran [Sfa]	2,865	54,036,000	18,478
	Layang Deles	2,592	38,880,000	15,000
	Lemadang	87,824	1,571,657,000	17,416
	Madidihang [Yft]	109,538	2,181,178,000	19,882
	Setuhuk Hitam	9,794	210,054,000	22,492
	Tenggiri [Com]	55,965	2,636,543,155	48,601
	Tenggiri Papan [Gut]	11,306	416,475,000	35,257
	Tongkol Abu-Abu [Lot]	1,084,802	19,736,566,732	51,733
	Tongkol Banyar [Kaw]	625,943	7,656,220,631	13,035
	Tongkol Pisang-Cerutu [Blt]	404,282	6,313,708,070	13,679
	Tuna Mata Besar [Bet]	274,865	6,554,105,000	23,766
Ikan Pelagis Besar Total		4,948,340	94,719,697,288	28,486
Ikan Pelagis Kecil	Bawal Hitam	4	159,345	45,000
	Belanak	163	2,373,000	15,200
	Ikan Tempel	295	305,000	1,141
	Japuh	37,898	144,024,669	4,317
	Julung-Julung	1,565	13,657,500	9,832
	Kembung Lelaki	380,157	6,793,324,980	14,319
	Kembung Perempuan [Rab]	81,680	1,267,427,112	16,040
	Kuniran	124	496,000	4,000
	Layang [Lajeng]	529,238	8,557,145,000	16,259
	Layang Anggur	51,435	570,222,000	11,121
	Layang Benggol	921,534	9,662,409,727	10,370
	Layang Deles	1,463,139	19,640,294,297	13,281
	Lemuru	570	5,700,000	10,000
	Pilok	115,831	871,960,937	7,180
	Selanget	1,637	3,995,000	3,478
	Selar Bentong	568,747	10,600,740,147	16,932
	Selar Komo	42,632	626,941,928	19,384
	Selar Kuning	77,745	646,878,346	6,916
	Siro [Ags]	1,947,581	16,042,556,560	7,323
	Sunglir	22,619	434,113,000	18,488
	Swanggi	101	393,900	3,900
	Talang-Talang	23,869	145,553,970	9,829
	Tembang	659,600	2,004,305,886	3,040
	Teri	69	555,000	8,117

	Tetengkek	40,480	249,340,822	4,870
Ikan Pelagis Kecil Total		6,968,712	78,284,874,126	11,039
Ikan Pelagis Kecil Lainnya	Bandeng	86	1,835,000	19,491
	Baronang	166	3,761,000	24,321
	Bulan-Bulan	305	1,980,000	7,298
	Cobia (Cba)	14,690	175,040,000	16,059
	Pisang-Pisang Merah	7	20,000	2,857
	Sokang	487	769,000	1,450
Ikan Pelagis Kecil Lainnya Total		15,741	183,405,000	15,043
Grand Total		13,121,233	206,907,639,156	25,633

F. Pemasaran dan Distribusi Ikan

Pada tahun 2024, sebanyak 89,27% dari total ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan merupakan ikan beku dan 10,73% berupa ikan segar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu ikan yang didaratkan dan dipasarkan dalam bentuk ikan segar mengalami kenaikan dari 9%. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah armada kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPN Pekalongan merupakan kapal-kapal diatas 30 GT yang melakukan penangkapan long trip atau dilaut lebih dari 3 bulan dengan Daerah Penangkapan Ikan di luar WPPNRI 712 sehingga membutuhkan bantuan freezer untuk menyimpan ikan agar kualitas ikan bagus sampai pendaratan ikan.

Ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan dipasarkan dan didistribusikan lokal dalam kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar kota antar provinsi. Dari total hasil tangkapan, sebanyak 65% dipasarkan lokal dalam daerah yaitu kota dan kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang. Sementara 35% dipasarkan antar kota maupun antar provinsi, diantaranya Bandung, Jakarta, Cilacap, dan Cirebon.

Adapun daerah tujuan pemasaran produk hasil tangkapan ikan PPN Pekalongan, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 16. Daerah Tujuan Pemasaran Ikan yang didaratkan di PPN Pekalongan Tahun 2024

No	Jenis Ikan	Kondisi Ikan	Tujuan	Volume (Kg)	Nilai (Rp.000)	Harga rata-rata/Kg (Rp)
1	Layang deles	Beku	Kota Bandung	2.151.924	24.459.205	11.366
2	Siro	Beku	Kab. Batang	1.940.261	15.408.461	7.941
3	Cakalang	Beku	Kota Pekalongan	1.877.343	37.943.833	20.211
4	Layang benggol	Beku	Kab. Batang	1.710.699	15.022.109	8.781
5	Tongkol abu-abu	Beku	Jakarta Utara	1.019.248	20.149.443	19.769
6	Kembung lelaki	Beku	Kab. Batang	904.620	10.309.523	11.397
7	Tongkol banyar	Beku	Kab. Batang	679.152	9.186.575	13.527
8	Tembang	Segar	Kota Pekalongan	598.297	2.115.371	3.536
9	Tongkol pisang-cerutu	Beku	Kab. Pekalongan	589.723	8.617.405	14.613
10	Selar bentong	Beku	Kab. Batang	516.696	7.648.117	14.802
11	Layang	Beku	Kota Bandung	489.134	6.589.074	13.471
12	Cumi-cumi	Segar	Kota Bandung	455.307	16.271.071	35.736
13	Bawal hitam	Beku	Kota Bandung	292.653	8.275.164	28.276
14	Tuna mata besar	Beku	Jakarta Utara	214.875	5.057.943	23.539
15	Pilok	Beku	Kota Pekalongan	128.263	929.423	7.246
16	Kembung perempuan	Segar	Jakarta Utara	104.195	1.525.403	14.640
17	Madidihang	Beku	Jakarta Utara	102.534	2.050.680	20.000
18	Selar kuning	Beku	Kab. Batang	78.286	534.219	6.824
19	Lemadang	Beku	Kab. Batang	71.566	1.276.585	17.838
20	Tetengkek	Segar	Kota Pekalongan	51.825	265.194	5.117
21	Layur	Beku	Kota Bandung	51.429	460.362	8.951
22	Tenggiri	Segar	Jakarta Utara	50.320	2.358.389	46.868

23	Rajungan	Beku	Kab. Pematang	48.261	2.320.820	48.089
24	Swanggi	Beku	Kab. Batang	42.166	291.620	6.916
25	Talang- talang	Beku	Kab. Banjarnegara	41.733	388.196	9.302
26	Layang anggur	Beku	Jakarta Utara	40.474	440.155	10.875
27	Alu-alu	Segar	Kota Pekalongan	39.403	709.458	18.005
28	Japuh	Segar	Kota Pekalongan	38.258	170.435	4.455
29	Manyung	Segar	Kota Pekalongan	35.902	580.627	16.173
30	Selar komo	Beku	Kota Bandung	35.155	656.641	18.678
31	Peperok	Segar	Kota Pekalongan	24.100	80.838	3.354
32	Udang dogol	Segar	Kab. Pematang	23.093	836.546	36.225
33	Sunglir	Beku	Kota Bandung	22.493	394.356	17.532
34	Kuwe selar	Beku	Kota Pekalongan	17.315	292.962	16.920
35	Udang krosok	Segar	Kota Pekalongan	16.764	209.245	12.482
36	Kurisi	Segar	Kota Pekalongan	16.685	82.261	4.930
37	Kuwe	Segar	Kota Pekalongan	14.163	282.454	19.943
38	Cucut mako	Beku	Jakarta Utara	13.665	136.650	10.000
39	Kuniran	Beku	Kab. Batang	12.265	103.436	8.433
40	Tenggiri papan	Segar	Kota Bandung	10.941	392.662	35.889
41	Layang spp	Beku	Jakarta Utara	9.699	124.907	12.878
42	Teripang	Segar	Kota Pekalongan	9.395	128.613	13.690
43	Setuhuk hitam	Beku	Kab. Batang	8.921	196.202	21.993
44	Beloso	Beku	Kota Pekalongan	8.733	73.896	8.462
45	Cucut lanjam	Segar	Kab. Batang	7.895	109.300	13.844
46	Lencam	Beku	Kota Pekalongan	7.844	120.275	15.333
47	Tigawaja	Segar	Kota Pekalongan	7.514	103.159	13.729

48	Hiu pilus	Segar	Kota Pekalongan	7.350	93.164	12.675
49	Kuro	Segar	Kota Pekalongan	7.043	190.042	26.983
50	Cobia	Beku	Kota Bandung	5.920	142.831	24.127
51	Pari kelapa	Segar	Kota Pekalongan	5.265	79.030	15.010
52	Sembilang	Segar	Kota Pekalongan	5.245	82.080	15.649
53	Sotong	Segar	Jakarta Utara	4.972	181.143	36.433
54	Kepiting bakau	Segar	Kota Pekalongan	4.668	209.136	44.802
55	Udang jerbung	Segar	Kab. Pematang	4.619	379.526	82.166
56	Kakap	Segar	Kota Pekalongan	3.567	99.438	27.877
57	Kuwe caudal hitam	Beku	Kota Bandung	3.512	111.821	31.840
58	Bawal jenggot	Beku	Jakarta Utara	3.280	32.459	9.896
59	Pari kembang	Segar	Kota Pekalongan	3.248	46.763	14.397
60	Peperok lainnya	Beku	Kota Pekalongan	3.212	12.276	3.822
61	Kakap batu	Segar	Kota Pekalongan	3.016	80.844	26.805
62	Kakap merah	Beku	Kota Bandung	2.968	131.841	44.421
63	Aruan tasek	Segar	Kota Pekalongan	2.932	48.386	16.503
64	Golok-golok	Segar	Kota Pekalongan	2.753	19.814	7.197
65	Simping	Segar	Kota Pekalongan	2.651	26.250	9.902
66	Remang	Segar	Kota Cirebon	2.470	37.661	15.247
67	Ikan ayam-ayam	Segar	Kota Bandung	2.285	32.381	14.171
68	Ikan sebelah	Segar	Kota Pekalongan	2.114	38.746	18.328
69	Ikan layaran	Beku	Kota Cirebon	1.871	34.134	18.244
70	Pari kekeh	Segar	Kota Pekalongan	1.842	36.433	19.779
71	Kerang darah	Segar	Kota Pekalongan	1.782	11.779	6.610
72	Selanget	Segar	Kab. Pekalongan	1.735	4.904	2.826

73	Kakap sejati	Segar	Kota Pekalongan	1.663	58.885	35.409
74	Julung-julung	Beku	Kab. Cilacap	1.544	14.154	9.167
75	Kerong-kerong	Beku	Kab. Pekalongan	1.539	5.124	3.329
76	Kakap jenaha	Segar	Kota Pekalongan	1.433	52.781	36.832
77	Teri	Beku	Kota Bandung	836	4.294	5.136
78	Kerapu balong	Beku	Kab. Batang	750	19.960	26.613
79	Tembang moncong	Segar	Kota Bandung	642	1.545	2.407
80	Silper	Beku	Kota Pekalongan	631	8.919	14.135
81	Bulan-bulan	Segar	Jakarta Utara	494	3.307	6.695
82	Sokang	Segar	Kab. Pekalongan	487	508	1.044
83	Kaci-kaci	Segar	Kota Pekalongan	301	7.200	23.922
84	Ikan lidah	Segar	Kota Pekalongan	257	2.744	10.676
85	Kambing-kambing	Beku	Kota Pekalongan	252	2.880	11.427
86	Kerapu lumpur	Segar	Kab. Batang	173	2.400	13.872
87	Kakap hitam	Beku	Kota Pekalongan	164	3.710	22.624
88	Ikan jaket	Beku	Kota Pekalongan	159	1.024	6.438
89	Belanak	Segar	Kota Pekalongan	138	2.002	14.504
90	Baronang	Segar	Kota Pekalongan	136	3.246	23.869
91	Bandeng	Segar	Kota Pekalongan	95	1.559	16.409
92	Gurita	Segar	Kota Pekalongan	74	1.627	21.993
93	Gerot-gerot	Beku	Kab. Batang	71	669	9.426
94	Kepe-kepe	Segar	Kota Pekalongan	50	720	14.400
95	Pisang-pisang	Beku	Kota Pekalongan	30	167	5.559
96	Julung-julung ulung-julung	Segar	Kota Pekalongan	24	110	4.583
97	Cucut martil	Beku	Kota Cirebon	20	360	18.000

98	Pari macan	Beku	Kab. Batang	18	180	10.000
99	Bawal putih	Segar	Kota Bandung	17	987	58.075
100	Kakap lodi	Segar	Kota Pekalongan	17	494	29.059
101	Tenggiri batang	Beku	Kota Pekalongan	16	400	25.000
102	Kerapu	Segar	Kota Pekalongan	13	412	31.700
103	Gindara	Beku	Jakarta Utara	5	110	22.000
104	Keting	Segar	Kota Pekalongan	5	30	6.000
105	Gabus	Segar	Kota Pekalongan	2	36	18.000
106	Remang putih	Segar	Kota Cirebon	1	12	12.000

G. Nelayan

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) jumlah nelayan di sekitar PPN Pekalongan pada tahun 2024 sebanyak 17437 orang, yang terdiri dari anak buah kapal (ABK) yang mengikuti kegiatan penangkapan pada kapal-kapal. Jumlah nelayan dan ABK yang aktif pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2023, hal ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah armada kapal yang beroperasi di PPN Pekalongan pada tahun 2024, dimana penurunan terjadi pada kapal-kapal >30GT dan melakukan trip yang panjang.

Nelayan yang melakukan kegiatan di PPN Pekalongan selain dari Kota Pekalongan, serta daerah Kabupaten sekitar seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang sebagai kru kapal ≥ 30 GT. Terdapat pula nelayan yang berasal dari Rembang, Demak, Pemalang dan Tegal serta dari Tuban (Jawa Timur). Umumnya mereka menggunakan kapal Mini Purse Seine (≤ 30 GT) yang dioperasikan saat bulan gelap dan musim angin Barat. Hal ini memberikan dampak yang cukup baik pada masyarakat sekitar PPN Pekalongan khususnya dan Kota Pekalongan pada umumnya terutama dibidang ekonomi dan ketenagakerjaan

Perkembangan jumlah nelayan di PPN Pekalongan Tahun 2015-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 17. Perkembangan jumlah tenaga kerja di PPN Pekalongan Tahun 2015- 2024

No.	Tahun	Jumlah	Nelayan	Pedagang/Pengolah	Pekerja Lainnya
	<i>Years</i>	<i>Total</i>	<i>Fishermen</i>	<i>Fish Traders/Processors</i>	<i>Workers</i>
1	2015	11,000	8,240	357	2,403
2	2016	9,859	7,212	229	2,418
3	2017	8,334	5,776	203	2,355
4	2018	7,304	4,763	201	2,340
5	2019	13,422	10,759	223	2,440
6	2020	14,044	11,437	232	2,375
7	2021	13,147	10,705	227	2,215
8	2022	9,892	7,626	145	2,121
9	2023	18,137	16,998	164	975
10	2024	17,437	15,774	672	991
	R (%)	10.95%	18.09%	27.93%	-7.15%

H. Inspeksi Pengendalian Mutu

Tahapan paling penting dari kegiatan penangkapan ikan adalah penanganan ikan setelah proses penangkapan dan saat pembongkaran hasil tangkapan. Tahapan tersebut, merupakan proses penanganan pada titik kritis dalam hal menjaga mutu hasil tangkapan sampai dengan proses hasil tangkapan didistribusikan agar mutu ikan selalu baik. Hal tersebut, merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik. Namun setelah terbitnya PermenKP Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan pelaksanaan Inspeksi Pengendalian Mutu di PPN Pekalongan mulai bulan Oktober tahun 2024 yang merupakan kewenangan dari BPPMHKP maka PPN Pekalongan tidak melakukan Inspeksi Mutu Ikan terhadap kapal-kapal perikanan.

I. Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)

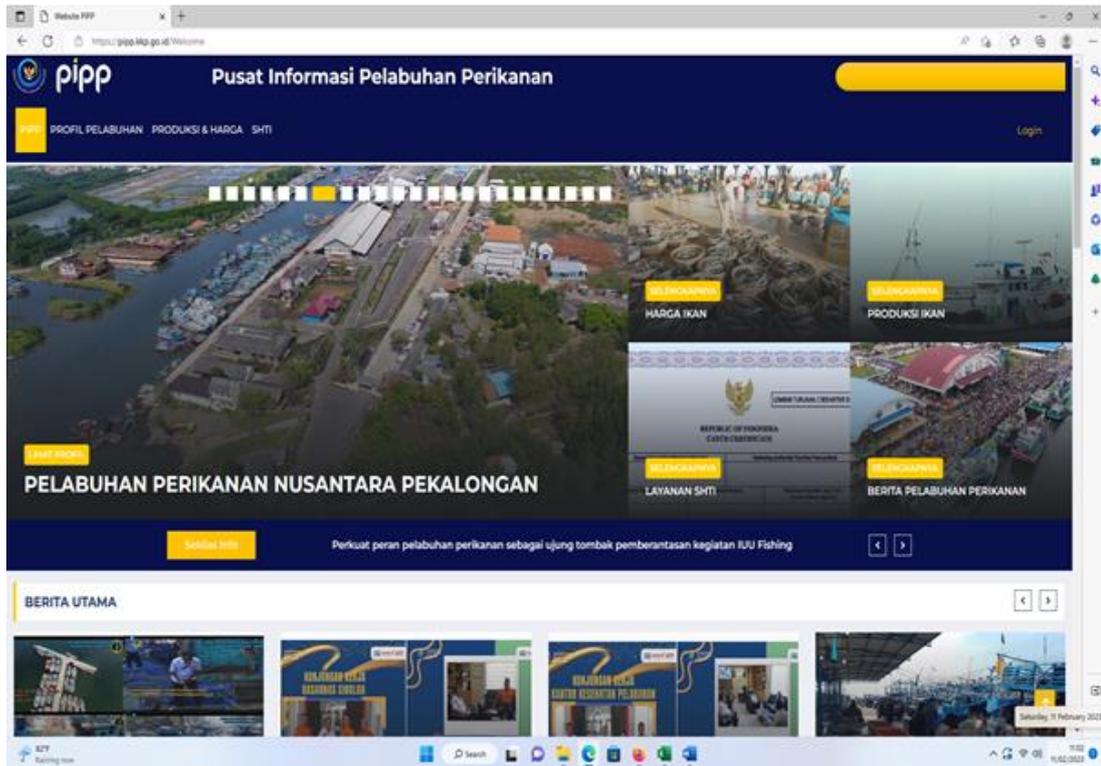
Pelaksanaan PIPP di PPN Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan secara harian, bulanan, dan situasional sesuai dengan format yang ada dalam Sistem Aplikasi PIPP itu sendiri. Pelaporan dilakukan dengan entry harian menggunakan fasilitas jaringan internet melalui sistem Aplikasi PIPP online (**pipp.kkp.go.id**). Laporan harian dievaluasi secara bulanan oleh Direktorat Pelabuhan Perikanan yang dilakukan pada tanggal 5 setiap bulannya. Untuk sementara data produksi harian diinput melalui aplikasi Input Data Produksi yang juga tergabung dalam Aplikasi DSS.

Pelaksanaan PIPP di PPN Pekalongan sebagai bentuk Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PT No.20/KEP-DJPT/2015 pengganti SK. No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008 dengan 27 (dua puluh delapan) jenis kriteria penilaian yang pada tahun 2015 dengan 11 kriteria penilaian, sebagai evaluasi kinerja yang dilakukan secara online. Perkembangan hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 18. Perkembangan Evaluasi kinerja UPT PPN Pekalongan Tahun 2024

No.	Bulan	Nilai	Kategori
1.	Januari	91,75	Sangat Baik
2.	Februari	91,75	Sangat Baik
3.	Maret	91,75	Sangat Baik
4.	April	92,00	Sangat Baik
5.	Mei	92,75	Sangat Baik
6.	Juni	88,75	Sangat Baik
7.	Juli	98,25	Sangat Baik
8.	Agustus	97,00	Sangat Baik
9.	September	98,25	Sangat Baik
10.	Oktober	98,25	Sangat Baik
11.	November	98,25	Sangat Baik
12.	Desember	98,25	Sangat Baik

Gambar 3. Aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP)



Secara umum pelaksanaan PIPP termasuk kedalam kategori **Sangat Baik** dengan rata-rata nilai evaluasi kinerja **94,75**. Adapun kendala teknis yang ditemui dalam *mengentry* data produksi adalah sulitnya operator/petugas input data produksi mengakses dan *mengentry* data produksi harian. Sehingga, meskipun dilakukan secara *online* namun membutuhkan waktu yang lama, dan mencoba secara berulang agar data dapat diinput dengan benar. Sebagai masukan untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan *maintenance* sistem aplikasi secara global sehingga aplikasi DSS dapat saling terhubung dengan kewenangan dan kebutuhan datanya masing-masing, dapat diakses, diinput dan digunakan hasilnya untuk pelaporan.

J. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

Operasional SHTI dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan. SHTI merupakan Dokumen yang menyatakan bahwa hasil perikanan tangkap yang diekspor bukan berasal dari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. SHTI diwajibkan terhadap

seluruh produk perikanan hasil tangkapan dari kapal berbendera Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap hasil perikanan dari kegiatan budidaya, produk perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, scallops, oyster. Selama Tahun 2024, PPN Pekalongan telah menerbitkan Lembar Awal Form A sejumlah 295 Lembar yakni ,71 SHTI Lembar Turunan dan 59 SHTI Lembar Turunan yang Disederhanakan.

Perkembangan jumlah SHTI di PPN Pekalongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 19. Perkembangan Pelayanan SHTI di PPN Pekalongan Tahun 2024.

No	Bulan	Lembar SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN (SHTI)					
		Jumlah LA	Volume Ikan (Ton)	Jumlah LT	Volume Ikan (Ton)	Jumlah LTS	Volume Ikan (Ton)
1.	Jan	19	-	8	-	7	-
2.	Feb	10	-	6	-	4	-
3.	Mar	8	-	9	-	3	-
4.	Apr	32	-	0	-	4	-
5.	Mei	22	-	19	-	7	-
6.	Jun	9	-	13	-	4	-
7.	Jul	32	-	4	-	6	-
8.	Agst	31	-	0	-	5	-
9.	Sept	26	-	0	-	4	-
10.	Okt	50	-	0	-	6	-
11.	Nov	29	-	4	-	5	-
12.	Des	27	-	8	-	4	-
TOTAL		295	-	71	-	59	-

K. *Logbook* Penangkapan Ikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang *Logbook* Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan, bahwa setiap kapal perikanan yang memiliki Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan serta melakukan operasi penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan *Logbook* Penangkapan Ikan yang merupakan tanggung jawab Nakhoda. Adapun penerapan *Logbook* Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan dilaksanakan melalui *Logbook* Penangkapan Ikan secara manual dan Aplikasi *E-Logbook* Penangkapan Ikan.

Pengisian data *Logbook* Penangkapan Ikan merupakan kewajiban Nakhoda kapal penangkap ikan pada saat pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan. Nakhoda wajib menyampaikan data *Logbook* Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat pelaporan kedatangan kapal perikanan, sebagai salah satu persyaratan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan. Adapun data *Logbook* Penangkapan Ikan yang telah disampaikan dan diverifikasi di PPN Pekalongan selama Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Perkembangan Jumlah *Logbook* di PPN Pekalongan Tahun 2024.

No.	Bulan	Jumlah
1.	Jan	0
2.	Feb	9
3.	Mar	8
4.	Apr	16
5.	Mei	7
6.	Jun	38
7.	Jul	45
8.	Agst	12
9.	Sept	19
10.	Dkt	49
11.	Nov	63
12.	Des	31
Jumlah		297

L. Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)

Sebagai langkah pencegahan terhadap praktik kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab atau illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing), maka diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap kapal perikanan yang digunakan untuk melakukan operasional perikanan tangkap telah mematuhi ketentuan pengelolaan perikanan yang berlaku, serta telah memenuhi aspek keselamatan meliputi aspek kelaiklautan, aspek kelaiktangkapan, dan aspek kelaiksimpanan, yang selanjutnya dibuktikan dalam bentuk Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP). Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan di PPN Pekalongan baru dimulai pada Bulan Juni Tahun 2022 pasca adanya peralihan kewenangan yang semula pada Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, bahwa Kepala Pelabuhan Perikanan memiliki kewenangan dalam hal menerbitkan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan bagi kapal perikanan yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Gubernur (Ijin Daerah). Guna menunjang tugas dan kewenangan tersebut, pada tahun 2024, di PPN Pekalongan terdapat 15 (lima belas) orang Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang berada di PPN Pekalongan dan Pelabuhan Binaan (PPN Tegalsari, PPP Kidang Lor, PPP Bajomulyo, PP Kluwut). Adapun Data Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang telah diterbitkan oleh Kepala PPN Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Data Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan Periode Tahun 2024.

No.	Bulan	Total
1.	Jan	3
2.	Feb	39
3.	Mar	29
4.	Apr	14
5.	Mei	7
6.	Jun	20
7.	Jul	15
8.	Agst	28

9.	Sept	5
10.	Okt	17
11.	Nov	15
12.	Des	26
Jumlah		1783

M. Operasional Kesyahbandaran

Pelaksanaan kegiatan Kesyahbandaran pada Pos Terpadu PPN Pekalongan selama periode Tahun 2024 telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Adapun uraian tugas dan wewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagai berikut :

1. Mengatur kedatangan kapal perikanan;
2. Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
3. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan;
4. Mengatur keberangkatan kapal perikanan;
5. Menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan;
6. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
7. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
8. Memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
9. Memeriksa log book penangkapan ikan;
10. Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
11. Mengawasi pemanduan;
12. Mengawasi pengisian bahan bakar;
13. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
14. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
15. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan;
16. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;

17. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan; dan
18. Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Adapun jumlah Dokumen Persetujuan Berlayar yang telah diterbitkan oleh Syahbandar di PPN Pekalongan selama periode Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 22. Jumlah Dokumen Persetujuan Berlayar di PPN Pekalongan Tahun 2024

No.	Bulan	Kapal PS < 30 GT	Kapal PS > 30 GT	Jumlah
1.	Jan	68	39	38
2.	Feb	27	30	53
3.	Mar	43	22	123
4.	Apr	52	23	75
5.	Mei	40	52	114
6.	Jun	56	27	75
7.	Jul	76	29	72
8.	Agst	81	29	89
9.	Sept	103	29	76
10.	Okt	117	24	83
11.	Nov	86	17	87
12.	Des	36	9	66
	Jumlah	785	330	1115

Adapun jumlah Dokumen Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan yang telah diterbitkan oleh Syahbandar di PPN Pekalongan selama periode Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Jumlah Dokumen STBLKK di PPN Pekalongan Tahun 2024

No.	Bulan	Kapal PS < 30 GT	Kapal PS > 30 GT	Jumlah
1.	Jan	75	113	113
2.	Feb	27	49	49
3.	Mar	27	50	50
4.	Apr	44	81	81
5.	Mei	62	79	79
6.	Jun	55	73	73
7.	Jul	74	96	96
8.	Agst	74	96	96
9.	Sept	98	127	127
10.	Okt	109	133	133
11.	Nov	103	131	131
12.	Des	40	80	80
Jumlah		788	320	1108

BAB V. KERAGAAN PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PELABUHAN

Kegiatan Pengembangan PPN Pekalongan dilaksanakan melalui kegiatan non fisik dan fisik. Kegiatan Non Fisik adalah kegiatan pelabuhan yang bersifat administrasi, pembinaan mental, pembinaan spiritual maupun yang bersifat kemasyarakatan. Sedangkan Kegiatan Fisik adalah kegiatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang bersifat penambahan aset maupun menambah nilai aset yang sudah ada.

A. Kegiatan Non Fisik

1. Persuratan dan Kearsipan

Disamping kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, dari sisi administrasi, berupa kegiatan surat menyurat juga dapat menggambarkan hubungan kerja antar lembaga. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat di PPN Pekalongan Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi PORTAL KKP dan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perkembangan kegiatan surat menyurat di PPN Pekalongan Tahun 2024 tercatat sebanyak 1.183 surat masuk dan 870 surat keluar. Perkembangan kegiatan surat menyurat di PPN Pekalongan TA.2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 24. Surat Masuk dan Keluar di PPN Pekalongan Tahun 2024

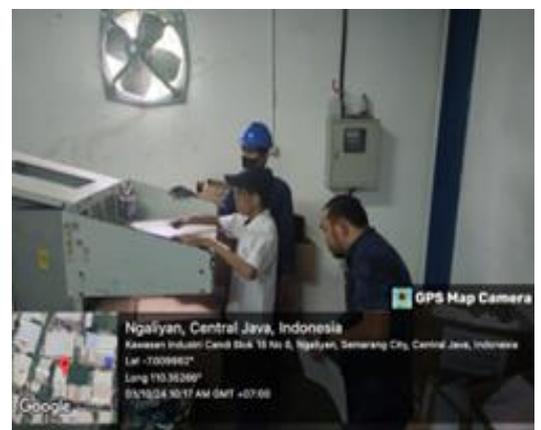
No.	BULAN	SURAT MASUK	SURAT KELUAR
1	Januari	133	74
2	Februari	108	80
3	Maret	86	76
4	April	69	43
5	Mei	79	80
6	Juni	71	41
7	Juli	110	62
8	Agustus	101	71
9	September	91	71
10	Oktober	114	103
11	November	104	79
12	Desember	117	90
JUMLAH		1.183	870

Kegiatan pengelolaan persuratan sangat berkaitan dengan pengelolaan kearsipan. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan arsip inaktif yang disimpan di ruang penyimpanan arsip, perlu dilakukan kegiatan penyusutan dan pemusnahan arsip dengan jangka waktu tertentu. Pelaksanaan tersebut, dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan tahap penyusutan dan pemusnahan arsip dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

- a) Pembuatan daftar pertelaahan arsip (DPA);
- b) Pemindahan arsip inaktif ke unit kearsipan;
- c) Penyerahan arsip;
- d) Pemusnahan arsip.

Pelaksanaan penyusutan arsip bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas yang masa retensinya sudah habis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, peraturan/prosedur administratif yang berlaku. Untuk tahun 2024, PPN Pekalongan melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 bertempat di PT Putraduta Buanasentosa/Indoarsip, Kawasan Candi Blok 18 No. 8 Jl. Gatot Subroto Semarang, Jawa Tengah. Adapun arsip yang telah dimusnahkan sebanyak 37 jenis dengan berat 346,70 kg.

Gambar 4. Kegiatan Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan



2. Kunjungan Tamu

Pemberian Pelayanan Prima merupakan kewajiban pegawai instansi pemerintah, khususnya dalam penerimaan tamu dalam berbagai keperluan terhadap instansi tersebut. Dengan adanya kunjungan tamu, maka akan terjadi adanya saling tukar menukar informasi mengenai perkembangan instansi asal tamu dan instansi yang dikunjungi. Adapun tamu tersebut berasal dari instansi pemerintah, instansi pendidikan/mahasiswa, instansi swasta, dan perorangan. Pada tahun 2024, jumlah tamu yang berkunjung sebanyak 700 orang, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 25. Jumlah Tamu yang berkunjung ke PPN Pekalongan Tahun 2024

No.	Bulan	Instansi Terkait	Instansi Pendidikan/ Mahasiswa	Instansi Swasta	Perorangan	Jumlah
1	Januari	17	10	11	13	51
2	Februari	14	3	8	16	41
3	Maret	19	5	18	39	81
4	April	29	28	24	9	90
5	Mei	24	3	12	14	53
6	Juni	13	5	15	25	58
7	Juli	15	3	12	14	44
8	Agustus	13	-	9	22	44
9	September	27	4	7	12	50
10	Oktober	19	2	10	2	33
11	November	30	2	21	27	80
12	Desember	34	2	8	31	75
JUMLAH TOTAL		254	67	155	224	700

3. Wisata Bahari

Wisata Bahari PPN Pekalongan atau yang lebih dikenal “Wisata Bahari PPNP” mulai aktif sejak didirikan pada tanggal 12 Juli 2006. Tujuan berdirinya Wisata Bahari adalah sebagai tempat wahana edukasi kebaharian mengenalkan kegiatan operasional perikanan serta memperkenalkan jenis ikan air laut dan tawar.

PPN Pekalongan sebagai pihak pengelola dari Wisata Bahari berusaha untuk mengaktifkan dan memajukan dengan berbagai cara diantaranya melalui :

1. Kegiatan sosialisasi, publikasi dan promosi berupa pembuatan stiker, *leaflet*, spanduk, pin berlogo wisata bahari, sosial media, dan melalui event tertentu misalnya senam pagi bersama dan kerja bakti;
2. Study banding pengelolaan wisata;
3. Bekerja sama dengan Instansi terkait, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Diklat, dan Komunitas menyelenggarakan acara di Wisata Bahari;
4. Penambahan spesies ikan, wall paper jenis ikan dan foto–foto jenis ikan;
5. Pemeliharaan wahana serta permainan anak.

Keberadaan wisata bahari sangat membantu masyarakat dalam hal menambah pengetahuan kebaharian. Pada tahun 2024, sebanyak 24.693 orang mengunjungi Wisata Bahari PPN Pekalongan. Ini berarti ada peningkatan sekitar 30,8 % jika dibanding tahun sebelumnya sebanyak 18.877 orang. Adapun jumlah pengunjung tersebut bisa dijabarkan dengan tabel berikut:

Tabel 26. Jumlah Kunjungan Bulanan Wisata Bahari PPN Pekalongan Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pengunjung (Orang)
1	Januari	1.724
2	Februari	1.861
3	Maret	1.154
4	April	3.010
5	Mei	2.049
6	Juni	2.110
7	Juli	2.351
8	Agustus	1.457
9	September	2.446
10	Oktober	2.332
11	November	2.109
12	Desember	2.090
Total		24.693

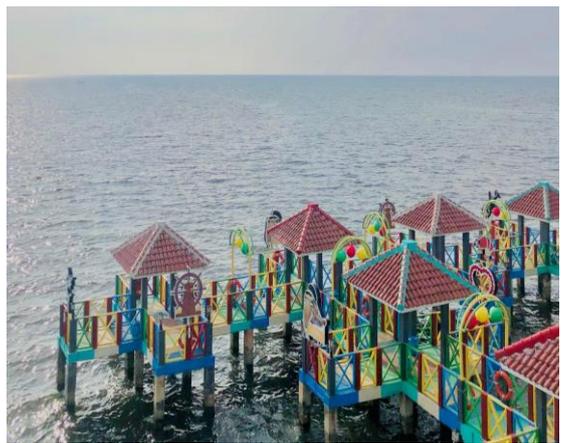
Perkembangan fasilitas Wisata Bahari PPN Pekalongan sampai dengan Tahun 2024 telah memiliki Aquarium, Wahana Edukasi Air, Gardu Pandang (Jetty), dan Arena Bermain Anak-anak (Playground). Khusus fasilitas Arena Bermain Anak-anak, telah berkembang dengan berbagai jenis permainan sebagai berikut :

- 1) Ayunan kecil;
- 2) Ayunan besar;
- 3) Kursi ayun;
- 4) Jungkat jungkit;
- 5) Mini *outbond*;
- 6) Globe;
- 7) Kursi putar;
- 8) Jembatan lorong
- 9) Prosotan;
- 10) Tangga Titian

Selain itu, beberapa fasilitas lain di Wisata Bahari PPN Pekalongan pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Gedung Pertemuan;
- 2) Studio Mini;
- 3) Mushola;
- 4) Kantin;
- 5) Toilet;
- 6) Gazebo;
- 7) Tempat parkir mobil dan motor
- 8) Pusat Informasi Pengunjung;
- 9) *Icon* Wisata Bahari;
- 10) Miniatur Alat Penangkapan Ikan;
- 11) Lampu Ornamen Ikan; dan
- 12) SWRO (*Sea Water Reverse Osmosis*);
- 13) Spot Mancing

Gambar 5. Wisata Bahari PPN Pekalongan Tahun 2024





4. Pengelolaan Kehumasan

Pengelolaan Kehumasan meliputi: Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan PPN Pekalongan, Publikasi melalui Media Sosial dan Media Lainnya, Pelayanan Informasi Publik, dan Pendampingan Pimpinan dalam Pertemuan/Rapat.

Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan PPN Pekalongan terdiri atas pengelolaan dokumentasi foto dan video. Adapun kegiatan yang didokumentasikan meliputi kegiatan rutin seperti: apel pagi, rapat pimpinan, rapat internal, pembongkaran ikan, kegiatan K5 di PPN Pekalongan; dan kegiatan tertentu, misalnya: kunjungan pejabat/UPT lain, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan lainnya yang sifatnya insidental. Selanjutnya, kegiatan tersebut juga dipublikasikan melalui beberapa media, yaitu: media social dan media cetak lainnya (spanduk/banner).

Saat ini, PPN Pekalongan memiliki 5 (empat) media sosial sebagai sarana publikasi informasi yaitu:

- 1) Instagram, dengan nama akun: ppn_pekalongan
- 2) Facebook, dengan nama akun: PPN Pekalongan
- 3) Twitter/ X, dengan nama akun: @PPNPekalongan
- 4) Tiktok, dengan nama akun: ppn.pekalongan
- 5) Youtube, dengan nama akun: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Terkait dengan pengelolaan media sosial PPN Pekalongan, admin media sosial PPN Pekalongan biasanya *memposting/mengunggah* berita/kegiatan di PPN Pekalongan ke 4 (empat) platform, yaitu: Instagram, Facebook, Twitter/X, dan Tiktok. Sedangkan untuk Youtube, hanya kegiatan tertentu dalam format video yang sekiranya berdurasi panjang.

Unggahan/*Postingan* di media sosial (IG, FB, X, dan Tiktok) biasanya kegiatan rutin seperti: apel pagi, bongkar ikan, rapat-rapat, sosialisasi, ucapan selamat, infografis, kegiatan event tertentu, dan publikasi informasi lainnya. Beberapa unggahan juga merupakan unggahan ulang (repost di IG atau retwit di X) dari akun media sosial lain yang relevan. Pada tahun 2024, *posting* di media sosial dilakukan sebanyak 924 unggahan dengan rincian sebagai berikut.

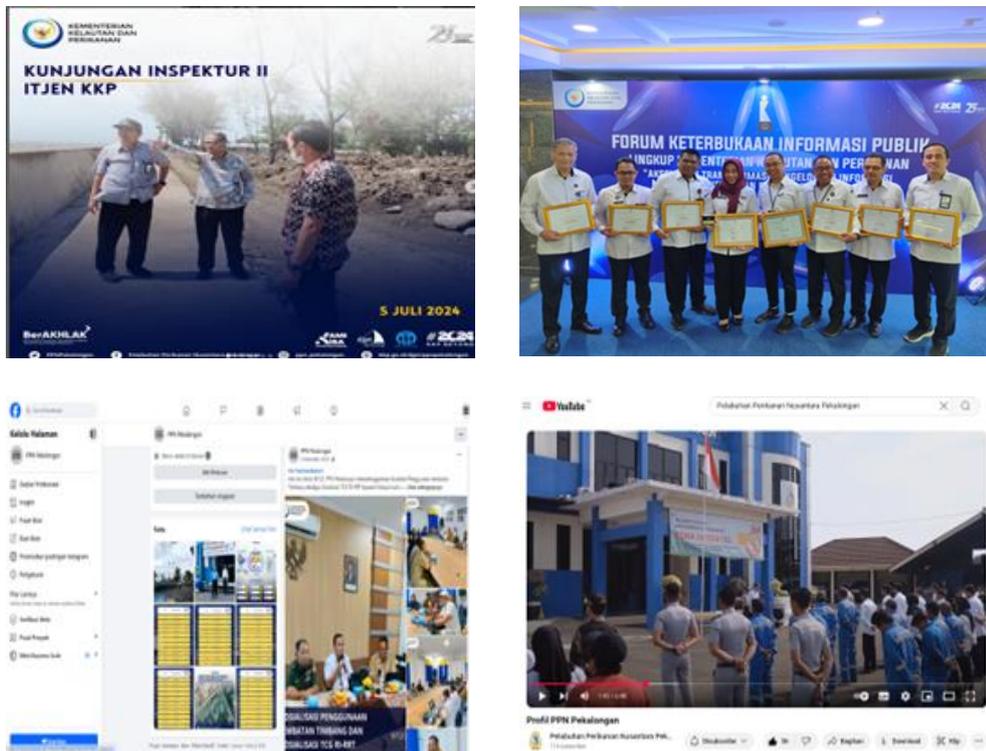
Tabel 27. Unggahan (*Posting*) di Media Sosial PPN Pekalongan Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah unggahan (<i>posting</i>)
1.	Januari	87 unggahan
2.	Februari	95 unggahan
3.	Maret	68 unggahan
4.	April	48 unggahan
5.	Mei	55 unggahan
6.	Juni	51 unggahan
7.	Juli	62 unggahan
8.	Agustus	66 unggahan
9.	September	79 unggahan
10.	Oktober	106 unggahan
11.	November	105 unggahan
12.	Desember	102 unggahan
Jumlah		924 unggahan

Kegiatan pendampingan pimpinan, dalam hal ini adalah Kepala PPN Pekalongan, dilakukan saat ada kunjungan pejabat atau rapat dengan pejabat, misalnya Menteri, Direktur Jenderal, Walikota, atau pejabat lainnya.

Selanjutnya, pada tahun 2024, PPN Pekalongan memperoleh penghargaan sebagai Unit Kerja dengan kualifikasi INFORMATIF yang diserahkan pada kegiatan Forum Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 25 Juli 2024 di Ballroom Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini, turut hadir Sekretaris Jenderal KKP dan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gambar 6. Kegiatan Pengelolaan Kehumasan



5. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5)

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan, pelabuhan perikanan merupakan tempat berkumpulnya beberapa orang dengan berbagai karakter untuk melakukan aktivitas perikanan yang menimbulkan suatu keramaian. Oleh karena itu, perlu adanya peran pelabuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian lingkungan yang

meliputi kegiatan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keselamatan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan bersih. Pelaksanaan K 5 di PPN Pekalongan dilaksanakan oleh Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) yang terdiri 12 orang tenaga keamanan dari PT Surya Kencana Servis (SKS) dan 14 orang tenaga kebersihan dari PT Ward Servis Indonesia (WSI).

Adapun pelaksanaan tugasnya diatur melalui jadwal piket dan dibagi pada masing–masing lokasi di wilayah kerja dan operasional PPN Pekalongan

Gambar 7. Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan & Keselamatan Kerja



6. Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan penilaian dari pengguna jasa pelabuhan yang dilakukan secara berkala terhadap kegiatan pelayanan publik di PPN Pekalongan. Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Survei

Kepuasan Masyarakat di PPN Pekalongan telah menggunakan pedoman sebagaimana dimaksud. Adapun nilai dari masing-masing unsur pada Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 28. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan I Tahun 2024

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR	per unsur	3,80	3,77	3,70	3,77	3,74	3,83	3,86	3,80	3,73
Kategori		A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM	Unit Layanan	94,44 (A atau Sangat Baik)								

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I PPN Pekalongan dari 9 (sembilan) jenis pelayanan bernilai = 94,44 yang termasuk dalam kategori A (Sangat Baik).

Tabel 29. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan II Tahun 2024

		Nilai Unsur Pelayanan								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR	per unsur	3,58	3,61	3,56	3,58	3,60	3,53	3,61	3,49	3,59
Kategori		A	A	A	A	A	B	A	B	A
IKM	Unit Layanan	89,33 (A atau Sangat Baik)								

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II PPN Pekalongan dari 9 (sembilan) jenis pelayanan bernilai = 89,33 yang termasuk dalam kategori A (Sangat Baik).

Tabel 30. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan III Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR per unsur	3,65	3,63	3,55	3,56	3,56	3,57	3,56	3,52	3,49
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	B	B
IKM Unit Layanan	89,12 (A atau Sangat Baik)								

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III PPN Pekalongan dari 9 (sembilan) jenis pelayanan bernilai = 89,12 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 31. Survei Kepuasan Masyarakat PPN Pekalongan Triwulan IV Tahun 2024

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR per unsur	3,67	3,68	3,59	3,69	3,59	3,62	3,63	3,58	3,56
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,55 (A atau Sangat Baik)								

Adapun bila dilihat secara umum, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV PPN Pekalongan dari 9 (sembilan) jenis pelayanan bernilai = 90,55 yang termasuk dalam kategori Sangat Baik.

7. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan

Kegiatan Diseminasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2024 di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pekalongan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala PPN Pekalongan dan dihadiri oleh sekitar 30 orang yang berasal dari instansi terkait, pemilik/pengurus kapal dan ABK/nelayan, dan bertindak sebagai narasumber adalah Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran Jajang Hartono, A.Pi. dan Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Joko Rianto, S.Pi., M.Pi.

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemilik, pengurus kapal perikanan ataupun Nakhoda kapal terkait pelaksanaan pemungutan PNBP Pasca Produksi;
2. Menyampaikan berbagai informasi dengan para pengguna jasa tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan PNBP Pasca Produksi;
3. Meningkatkan komunikasi dan sinergitas antara pengguna jasa dengan pihak pelabuhan dalam hal implementasi pemungutan PNBP Pasca Produksi.

Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan PNBP Pascaproduksi di PPN Pekalongan merupakan salah satu upaya guna menyampaikan berbagai informasi terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan PNBP Pasca Produksi. Selain itu, kegiatan ini merupakan sarana sharing session antara pengguna jasa dengan pihak PPN Pekalongan terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan PNBP Pascaproduksi, terutama terkait mekanisme serta alur proses pelaksanaannya.

Penetapan kebijakan pemungutan PNBP Pasca Produksi yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2023 berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 pada seluruh Pelabuhan perikanan yang telah ditunjuk. Setiap kapal perikanan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya pada pelabuhan pangkalan dan menerapkan PNBP dengan sistem Pasca Produksi. Tujuan kebijakan ini berkaitan dengan keberlanjutan perikanan yang mengacu pada potensi perikanan lestari. Zona penangkapan perikanan dibagi kedalam 6 zona baru, sehingga kapal dapat memperluas

wilayah tangkapan dan meningkatkan produksi perikanan. Setiap pelaku usaha akan memperoleh kuota penangkapan secara tetap yang dibagi dalam beberapa kapal. Kapal yang telah berlayar diperbolehkan melakukan penangkapan kembali asalkan kuota yang ditetapkan masih tersedia. Perbedaan sistem pasca produksi dengan praproduksi terletak pada pembayaran PNBP yang dilakukan setelah kapal melakukan trip dan didasarkan oleh hasil jumlah tangkapan ikan, indeks tarif serta harga acuan ikan, harga acuan ikan disetiap Pelabuhan kemungkinan akan berbeda beda , hal tersebut disesuaikan dengan harga ikan di wilayah pendaratan ikan. Kapal yang sudah mengurus perizinan dengan sistem pasca produksi akan mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan pangkalan dan melakukan penimbangan secara online selanjutnya hasil penimbangan tersebut akan dijadikan salah satu dasar dalam menetapkan nilai PNBP yang harus dibayarkan oleh pihak pemilik kapal.

Gambar 8. Diseminasi Regulasi Kesyahbandaran dan Aplikasi Teman SPB dalam rangka Mendukung Pelaksanaan PNBP Pascaproduksi



8. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan

Sebagai salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan guna menyampaikan berbagai informasi terkait data Penangkapan Ikan Terukur yang dicatat pada Logbook Penangkapan Ikan oleh masing masing pelaku usaha, khususnya para Nahkoda Kapal Perikanan, diselenggarakan Kegiatan Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Juli 2024 di Balai Pertemuan Nelayan PPN Pekalongan. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 orang yang berasal dari instansi terkait, pemilik/pengurus kapal, dan ABK/nelayan yang berasal dari Kawasan Kota Pekalongan dan sekitarnya.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para Mitra Kerja, Petugas terkait di Pelabuhan Binaan terkait dengan Logbook Penangkapan Ikan;
2. Menyampaikan berbagai informasi dengan para Mitra kerja tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Logbook Penangkapan Ikan;
3. Meningkatkan komunikasi dan sinergi antara Mitra Kerja dengan pihak PPN Pekalongan dalam Pengisian dan Penyampaian Logbook Penangkapan Ikan.

Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana *sharing discussion* antara petugas pelayanan di Pelabuhan binaan, mitra kerja dengan pihak PPN Pekalongan terkait pelaksanaan Pasca Produksi tahun 2024, di mana PPN Pekalongan merupakan Pelabuhan Induk dari lima pelabuhan binaan (PPN Pekalongan, PPN Tegalsari, PPP Klidang Lor, PPP Asemtoyong, PP Kluwut) yang ditunjuk sebagai pelabuhan pangkalan yang menerapkan Pasca Produksi.

Adapun susunan acara pada kegiatan Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan dan Sambutan oleh Kepala PPN Pekalongan.
2. Pemaparan Materi tentang Penerapan eLogbook Penangkapan Ikan oleh Bapak Gunawan Dwi Nugroho dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan secara daring, dengan moderator Ketua Timja Kesyahbandaran PPN Pekalongan.

3. Sesi diskusi dan tanya jawab.

Dalam sambutannya, Kepala PPN Pekalongan menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap tahun, tetapi dalam pelaksanaannya pasti ada kendala lapangan terkait pengisian eLogbook. Sehingga, melalui forum ini diharapkan dapat ditanyakan/ didiskusikan dengan narasumber.

Hasil kegiatan sosialisasi diatas adalah bahwa Pelaksanaan Logbook Penangkapan Ikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan penangkapan ikan. Data Logbook yang dikumpulkan memiliki bermacam fungsi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan kedepan, di antaranya untuk menghitung potensi sumber daya ikan di WPPNRI dan menghitung alokasi usaha penangkapan ikan di suatu perairan serta melaksanakan analisis tingkat kepatuhan para pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Selain itu, data Logbook Penangkapan Ikan juga digunakan sebagai dasar dalam penetapan kuota hasil tangkapan dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

Penerapan Logbook Penangkapan Ikan diwajibkan bagi setiap kapal penangkapan ikan berukuran >5 GT. Pengisian data Logbook Penangkapan Ikan wajib dilakukan dengan menggunakan Aplikasi eLogbook Penangkapan Ikan. Sedangkan kapal perikanan ukuran sampai dengan ukuran 5GT wajib menginput data logbook penangkapan ikan yang disederhanakan. Pengisian data logbook penangkapan ikan yang disederhanakan dapat dilakukan di laut pada saat kegiatan penangkapan ikan atau di Pelabuhan Perikanan setelah kegiatan pendaratan hasil tangkapan berlangsung.

Data Logbook Penangkapan Ikan yang telah disampaikan oleh Nakhoda selanjutnya diverifikasi dengan mengacu pada beberapa aspek, yang meliputi: kesesuaian daerah penangkapan ikan, kesesuaian API dengan jenis ikan yang didaratkan, kesesuaian hasil tangkapan yang dilaporkan melalui *logbook* dengan data *landing*, kesesuaian ukuran kapal dengan jumlah hasil tangkapan, kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan kesesuaian data setting dengan lama waktu melaut. Data hasil tangkapan Kapal Perikanan harus dilaporkan kepada Petugas PNPB Pasca Produksi dengan cara para Nakhoda melakukan pencatatan dan mengestimasi hasil tangkapan pada Logbook Peangkapan Ikan sebelum Kapal bersandar dan bongkar pada Pelabuhan Perikanan.

Adapun kendala yang sering dihadapi di lapangan yakni terjadinya aplikasi yang eror serta terdapat handphone yang tidak terkoneksi dengan GPS yang mengakibatkan aplikasi tersebut tidak dapat digunakan. Kendala tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran Aplikasi ELogbook Penangkapan Ikan untuk ke depan.

Di sela-sela kegiatan, Katimja Kesyahbandaran juga menyampaikan sosialisasi terkait Proses Bisnis Level 3 Pengelolaan Operasional Pelabuhan Pangkalan (SOP Bersama DJPT-DJPSDKP).

Gambar 9. Sosialisasi Pengumpulan dan Verifikasi Data Logbook Penangkapan Ikan di PPN Pekalongan



9. Patroli Dialogis dan Pengawasan Perlindungan Maritim di Kawasan PPN Pekalongan

Kegiatan Patroli Dialogis dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024, dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan lingkungan maritim di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka persiapan Libur Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 6 – 16 April 2024. Sehingga perlu diadakannya Sosialisasi dan Edukasi terkait Keamanan dan Ketertiban Kapal Perikanan yang sandar di wilayah kerja operasional PPN Pekalongan.

Kegiatan patroli dialogis tersebut dilaksanakan dengan melakukan pendataan kapal perikanan yang sandar dan berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Pelaksanaan kegiatan Patroli dialogis difokuskan pada memberikan himbauan dan edukasi terkait keamanan dan ketertiban kapal perikanan selama bulan Ramadhan hingga selesainya libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024. Selama pelaksanaan kegiatan patroli dialogis, petugas menyampaikan berbagai himbauan maupun pendataan kapal pasca yang disampaikan kepada seluruh masyarakat perikanan yang sedang beraktifitas di kawasan dermaga barat dan dermaga timur, sekitar kawasan alur Sungai Banger dan Kolam Retensi Kota Pekalongan.

Adapun substansi informasi dan pendataan yang disampaikan oleh petugas pelaksana terfokus pada beberapa hal krusial diantaranya sebagai berikut :

- a. Himbauan kepada seluruh pekerja pada bidang perikanan tangkap terutama para pekerja yang melaksanakan pekerjaan perbaikan kapal serta perawatan kapal perikanan agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan tetap memperhatikan protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- b. Menghimbau masyarakat perikanan agar dapat turut serta menjaga kebersihan lingkungan dan ekosistem perairan, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan baik ke sungai ataupun laut terutama sampah-sampah yang tidak mudah terurai yakni meliputi sampah plastik, sampah fiber, sampah sterofoam serta sisa-sisa oli, air ballast, dan solar yang tentunya semua sampah tersebut sangat berdampak buruk bagi keberlanjutan lingkungan terutama ekosistem perairan sungai dan pantai;
- c. Himbauan juga disampaikan kepada masyarakat perikanan agar senantiasa dapat memperhatikan resiko kebakaran dalam melaksanakan pekerjaannya yakni dengan

cara tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak melakukan pengelasan di dekat benda-benda yang mudah terbakar diatas kapal.

Selain melaksanakan pemantauan di lapangan terhadap kondisi alur serta kapal perikanan yang sedang bersandar, petugas juga melaksanakan pendataan kapal perikanan yang berada pada kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 176 kapal perikanan yang berada pada PPN Pekalongan dengan rincian 84 kapal di dermaga timur, 46 kapal di dermaga barat, dan 46 kapal di kolam retensi.

Tim patroli dialogis juga memasang stiker–stiker yang berisi himbauan di kapal-kapal perikanan, sehingga dapat menjadi pengingat kepada seluruh ABK Kapal Perikanan. Dalam hal tindakan preventif mencegah kebakaran dan adanya ancaman lain, seperti keributan ataupun kebersihan di wilayah kerja Operasional PPN Pekalongan, juga dilakukan pemasangan spanduk himbauan yang cukup besar di lokasi dermaga timur dan dermaga barat.

Gambar 10. Kegiatan Patroli Dialogis dan Pengawasan Perlindungan Maritim di Kawasan PPN Pekalongan





10. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Oktober 2024 di Balai Pertemuan PPN Pekalongan. Peserta kegiatan ini sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Dinas Lingkungan Hidup, PT Perindo Cabang Pekalongan, Satwas SDKP Kota Pekalongan, Satpolairud Polres Pekalongan Kota, KSOP Kelas IV Tegal Wilker Pekalongan, Komandan Kapal Patroli Ditpolairud Polda Jawa Tengah, Balai Kekarantinaan Kesehatan Wilker Pekalongan, dan Tenaga Kebersihan PPN Pekalongan dari PT WSI.

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan Tahun Anggaran 2024 yaitu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Dr. Sri Budi Santoso, M.Si., dengan moderator Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Adi Setiawan, S.E.

Dalam kegiatan ini, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, menyampaikan sambutannya yang menyinggung bahwa isu terkait pengelolaan sampah menjadi perhatian serius bagi semua kalangan, karena menjadi masalah lingkungan nomor 1 (satu) di dunia, begitu juga di Indonesia, terutama sampah plastik. Data menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 (dua), setelah China. Oleh karenanya, perlu ada langkah konkret untuk penanganan sampah ini.

Pada level pelabuhan perikanan, khususnya PPN Pekalongan, masalah pengelolaan sampah juga mendapatkan perhatian serius. Secara kelembagaan, tata Kelola lingkungan menjadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dimonitor oleh kantor pusat (Direktoral Kepelabuhanan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap) melalui Aplikasi SELARASKAN. Aplikasi SELARASKAN merupakan implementasi digital dari penerapan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan yang memungkinkan operator di Pelabuhan perikanan melakukan *input* data terkait kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan secara *real time*. Melalui aplikasi ini, kita melaporkan aktivitas kebersihan, penimbangan sampah, pengolahan sampah, keamanan, patrol hemat energi, limbah B3, dan lain-lain.

Namun demikian, terkait dengan pengolahan sampah, baik itu sampah organik dan anorganik, masih belum optimal. Sehingga, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pegawai dan stakeholders terkait pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah di kawasan pelabuhan. Dalam hal pengelolaan sampah di kawasan pelabuhan, perlu adanya sinergitas antar instansi terkait, serta himbauan rutin kepada pemilik kapal dan stakeholders lainnya untuk tidak melakukan kegiatan pencemaran lingkungan, misalnya buang sampah sembarangan, buang oli sembarangan, dan lain-lain.

Selanjutnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Bapak Dr. Sri Budi Santoso, M.Si., selaku narasumber, menyampaikan materi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan dengan Prinsip 3R. Kegiatan ini dimoderatori oleh Bapak Adi Setiawan, S.E., Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.

Dalam paparannya, disampaikan beberapa materi, antara lain:

A. Isu strategis lingkungan dalam tataran global-nasional-lokal;

Terkait dengan isu strategis lingkungan dalam tataran global-nasional-lokal, pada tahun 2045, diperkirakan terjadi kecenderungan global (Mega Trend 2045), yang meliputi:

- Demography Global, dimana jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,45 milyar;
- Urbanisasi Dunia, penduduk perkotaan meningkat menjadi 65%;
- Peranan Emerging Economies, output negara berkembang diperkirakan 71% dari total output dunia;
- Perdagangan Internasional, diperkirakan tumbuh 3,4 % per tahun;
- Keuangan Internasional, dominasi mata uang dunia bergeser dari USD ke multicurrencies;
- Kelas Menengah, diperkirakan jumlahnya mencapai 81% (middle and upper class);
- Persaingan SDA, ketersediaan SDA tidak mampu memenuhi permintaan yang meningkat;
- Teknologi, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa (teknologi informasi, bioteknologi, rekayasa genetika, Kesehatan, AI, dll)
- Perubahan Iklim, tantangan pemanasan global semakin besar, kejadian ekstrim;
- Perubahan geopolitik, semakin menguatnya peranan China.

B. Pengelolaan sampah dan limbah;

Pengertian Sampah menurut WHO adalah suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. Sampah dapat bersumber dari berbagai aktivitas seperti rumah tangga, sampah pertanian, sampah sisa bangunan, sampah dari perdagangan dan perkantoran, serta sampah dari industri. Sampah yang paling banyak dihasilkan berasal dari rumah tangga. Sampah bisa dikategorikan sebagai sampah domestik dan sampah non-domestik. Sampah domestik misalnya: sampah rumah tangga dan pemukiman. Sampah non domestik misalnya: sampah perkantoran, sampah industri, sampah pariwisata, sampah dari restoran, dan sampah pertanian. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan menjadi sampah organik (dapat diurai) dan sampah anorganik (tidak dapat diurai), berdasarkan bentuknya, dibedakan menjadi sampah padat, sampah cair, dan sampah gas.

Terkait dengan kondisi pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut, disebabkan oleh tumpahan minyak dan sampah di kawasan pesisir, TPS yang ada dalam kondisi terbuka, sehingga sampah-sampah berceceran dan tidak beraturan. Kemudian, terkait dengan persoalan sampah laut, tidak bisa dilepaskan dari kegiatan penangkapan ikan yang berpusat di Pelabuhan. Sebab itu, pengurangan sampah di laut, harus dimulai dari perbaikan tata kelola sampah pelabuhan.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk optimalisasi penanganan sampah, antara lain:

- 1) Penanganan sampah dari hulu ke hilir:
 - a. Usaha penyadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, merubah perilaku dengan membuang sampah pada tempatnya;
 - b. Memberikan edukasi kepada anak didik dan generasi muda, memilah sampah yang benar;
 - c. menekan produksi sampah domestik.
- 2) Penanganan sampah sektor hilir:
 - a. Dibuat sistem pengumpulan, pengangkutan dan pengelolaan sampah yang terpadu;
 - b. memanfaatkan sampah untuk daur ulang menjadi barang-barang yang berguna;
 - c. menciptakan teknologi yang dapat mengolah sampah menjadi energi dan bahan baku industri.
- 3) Penanganan sampah sektor pemerintah/pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yaitu dengan membuat kebijakan dan peraturan perundangan yang dapat mengatur dan menekan produksi sampah:
 - a. melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, menyusun perencanaan dan membuat target-target dalam penanganan dan pengurangan sampah;
 - b. mendorong terbentuknya relawan dan pejuang dalam mengatasi sampah;
 - c. mendorong terbentuknya bank-bank sampah;
 - d. menjalin kerjasama dengan investor dalam mengelola sampah menjadi energi dan bahan baku industri;
 - e. menyediakan anggaran yang cukup untuk pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan mengapresiasi pengelolaan Sampah dan Limbah di PPN Pekalongan dan pelaksanaan ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, walaupun belum optimal;
2. Terkait dengan penanganan limbah, terutama limbah cair dan B3, PPN Pekalongan perlu bekerja sama dengan vendor pengangkut dan pengolah;
3. Guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membuang sampah dan limbah di kawasan Pelabuhan, perlu dukungan instansi terkait untuk terus mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
4. PPN Pekalongan diharapkan bisa berpartisipasi aktif untuk menjadi nasabah bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
5. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah.

Gambar 11. Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan Perikanan





11. Sosialisasi Penanganan Kebakaran di Kawasan Pelabuhan

Kegiatan Sosialisasi Penanganan Kebakaran Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 24 September 2024, di Balai Pertemuan PPN Pekalongan. Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di Kawasan Pelabuhan adalah 30 (tiga puluh) orang meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, KSOP Kelas IV Wilker Pekalongan, Satwas SDKP Wilker Pekalongan, Ditpolairud Polda Jawa Tengah, Satpolairud Polres Pekalongan Kota, Pos TNI AL Pekalongan Kota, Satpol P3KP, Kepala UPTD TPI Kota Pekalongan, BKK Wilker Pekalongan, pemilik/ABK kapal, dan tenaga keamanan PPN Pekalongan dari PT WSI.

Narasumber pada kegiatan Sosialisasi Penanganan Kebakaran Tahun 2024 adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan, Sriyana, S.Sos, M.Si., dengan moderator Kepala Seksi Pencegahan dan Informasi Pemadam Kebakaran Kota Pekalongan, F. Eka Laksana Putra, S.I.Kom, M.Si.

Sebelum pemaparan materi oleh narasumber, Kasubbag Umum mewakili Kepala PPN Pekalongan, Amelia, S.St.Pi menyampaikan beberapa hal terkait penanganan kebakaran. Penanggulangan/Penanganan kebakaran merupakan bagian dari Keselamatan Kerja sebagaimana dalam UU Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Hal ini juga mencakup keselamatan kerja di kawasan Pelabuhan perikanan, termasuk PPN Pekalongan.

Isu ini belakangan mendapat perhatian serius dari KKP karena sering terjadinya kebakaran kapal di pelabuhan perikanan, sehingga perlu adanya mitigasi yang tepat

terkait hal ini. Kejadian kebakaran kapal di Jakarta, Tegal, dan Cilacap beberapa waktu lalu agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai hal ini terjadi di PPN Pekalongan. Salah satu titik rawan lokasi kebakaran di kawasan PPN Pekalongan adalah kawasan kolam retensi di Kelurahan Krapyak, di mana terdapat kapal yang melakukan tambat labuh.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pegawai dan stakeholders terkait penanganan kebakaran baik itu yang terjadi di dalam Gedung perkantoran maupun kebakaran kapal. Dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kapal/Kawasan palabuhan, perlu adanya sinergitas antar instansi terkait, serta himbauan rutin kepada pemilik kapal untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu bahaya kebakaran.

Selanjutnya, Kepala Satpol P3KP Kota Pekalongan, Sriyana, S.Sos, M.Si. selaku narasumber menyampaikan materi terkait Data dan Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol P3KP, Kota Pekalongan Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, salah satu fungsinya adalah pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Fungsi ini dilaksanakan oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pada tahun 2024, kejadian kebakaran di Kota Pekalongan dan sekitarnya, sampai dengan tanggal 20 September 2024 terjadi 43 kejadian, yang didominasi oleh kebakaran lahan sebanyak 17 kejadian. Sedangkan penyebab kebakaran didominasi oleh pembakaran sampah sebanyak 23 kejadian atau 53%. Data kejadian kebakaran tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebanyak 101 kejadian.

Selain pemadaman kebakaran, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melaksanakan fungsi non kebakaran yaitu kegiatan penyelamatan. Adapun jenis kegiatan penyelamatan yang pernah dilakukan antara lain:

1. Evakuasi Sarang Tawon Vespa Avinis : 58 laporan;
2. Evakuasi Ular : 87 laporan;
3. Kecelakaan Lalin: 5 laporan;

4. Edukasi Anak Usia Dini : 36 laporan;
5. Evakuasi Cincin : 21 laporan;
6. Lain-lain (anak kucing, kunci & dompet jatuh ke gorong-gorong, terjepit resleting, dll) : 49 laporan.

Dengan banyaknya kejadian bencana kebakaran maupun non kebakaran, Satpol P3KP Kota Pekalongan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran, antara lain:

1. Sosialisasi dan Simulasi (di Kecamatan, di Kelurahan, di Kantor, di Perusahaan dan lain-lain): 20 kali
2. Inspeksi Proteksi Kebakaran (Kantor, Mal, Hotel, Resto, RS, Bank, dll) : 53 kali
3. Sosialisasi dan Iklan Layanan Masyarakat melalui media sosial, Radio, dan TV.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selain dilaksanakan oleh pegawai, layanan pemadam kebakaran juga dibantu oleh relawan pemadam kebakaran (REDKAR). Saat ini, total jumlah relawan kebakaran di bawah koordinasi Satpol P3KP Kota Pekalongan sebanyak 93 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil rekrutmen pada tahun 2022 sebanyak 68 orang, dan rekrutmen pada tahun 2023 sebanyak 25 orang. Sedangkan tahun 2024, Satpol P3KP Kota Pekalongan akan segera melakukan rekrutmen relawan pemadam kebakaran.

Pada rangkaian kegiatan Sosialisasi Penanganan Kebakaran di PPN Pekalongan Tahun 2024, dilakukan Simulasi Penanganan Kebakaran yang difasilitasi oleh Tim Teknis Pemadam Kebakaran Kota Pekalongan.

Dalam simulasi ini, dilakukan pemadaman kebakaran tabung gas, pemadaman kebakaran dengan menggunakan APAR, dan pemadaman kebakaran dengan menggunakan karung goni yang basah. Kegiatan ini diikuti oleh semua peserta kegiatan Sosialisasi Penanganan Kebakaran di PPN Pekalongan Tahun 2024.

Gambar 12. Sosialisasi Penanganan Kebakaran di PPN Pekalongan



12. Pelaksanaan ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015

Pelaksanaan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu diterapkan di PPN Pekalongan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 dilakukan terminasi dan kembali dilanjutkan pada tahun 2024.

Untuk ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, PPN Pekalongan mulai menerapkan sejak tahun 2022. Meskipun pada awal ruang lingkupnya terbatas, yaitu pada isu penghematan energi, namun dalam perkembangannya, ruang lingkupnya meluas di seluruh kawasan Pelabuhan.

Pada tanggal 11-12 November 2024 dilakukan audit eksternal (*surveillance*) dari PT QAI Indonesia secara daring, baik untuk penerapan ISO 9001:2015 maupun ISO 14001:2015. Adapun rekomendasi dari kegiatan *surveillance* ini adalah sebagai berikut:

- ISO 9001:2015
 - 1) PPN Pekalongan belum menetapkan Sasaran Mutu sesuai fungsi, tingkatan dan proses yang dibutuhkan.
 - 2) PPN Pekalongan menggunakan Penyedia Eksternal dalam rangka dapat menyajikan produk dan jasa yang dihasilkan. Belum ada bukti tertulis bahwa Penyedia telah dilakukan Evaluasi.
 - 3) PPN Pekalongan telah melakukan Audit Internal ISO 9001:2015, pada 31 Oktober 2024, dengan 3 Auditor, namun masih terdapat hal-hal yang perlu dipenuhi, yakni :
 1. Laporan Audit belum diperlihatkan untuk memastikan bahwa seluruh klausul telah di Audit, karena Audit Plan dilakukan per Area
 2. Auditornya belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan Audit (Belum mendapatkan pelatihan Audit

- ISO 14001:2015
 - 1) PPN Pekalongan saat ini belum menyusun isu internal dan eksternal, serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan terkait penerapan Sistem Manajemen Lingkungan.
 - 2) PPN Pekalongan saat ini belum menyusun Aspek dan Dampak Lingkungan terkait penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, terkait kegiatan yang ada.
 - 3) PPN Pekalongan saat ini belum melakukan evaluasi kepatuhan dan ketaatan atas peraturan dan persyaratan lingkungan yang berlaku.
 - 4) PPN Pekalongan saat ini telah memiliki dokumen dokumen terkait Sistem Manajemen Lingkungan, diantaranya Panduan Sistem Manajemen Lingkungan namun ada informasi terdokumentasi yang belum disiapkan, diantaranya Prosedur Kesiapan dan tanggap darurat.
 - 5) PPN Pekalongan belum melaksanakan Kaji Ulang Manajemen terkait penerapan ISO 9001:2015 dan 14001:2015, yang telah dilaksanakan, sehingga tidak dapat diketahui Kinerja dari penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan tersebut.

Seiring dengan pelaksanaannya, penerapan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan juga dilaporkan melalui aplikasi SELARASKAN (Sistem Aplikasi Tata Kelola dan Lingkungan Pelabuhan Perikanan) Versi 2 yang berisi program kegiatan manajemen

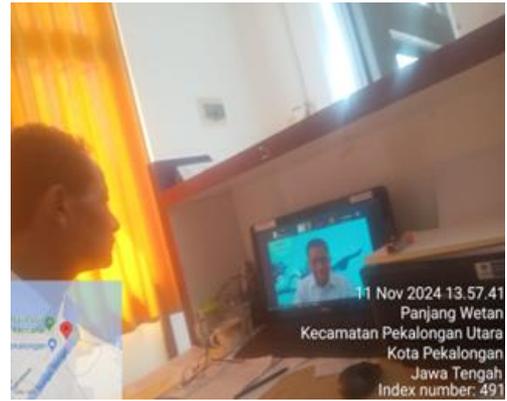
lingkungan di Kawasan Pelabuhan Perikanan. Adapun program tersebut meliputi program kegiatan yang sifatnya wajib (*mandatory*) maupun tambahan (*voluntary*).

Program mandatory berjumlah 18, meliputi: kebersihan area Pelabuhan, pengukuran sampah darat, pengukuran sampah laut, pemilahan sampah sesuai jenis, pengolahan sampah, pengukuran kualitas udara, upaya penambahan/pemeliharaan RTH di kawasan, pengukuran kualitas air kolam Pelabuhan, pengukuran kualitas air limbah Pelabuhan, penggunaan lampu hemat energi, himbauan hemat energi dan air, patroli energi dan air, patroli keamanan dermaga dan kolam Pelabuhan, himbauan keselamatan dermaga dan kolam Pelabuhan, update drone bulanan, penyediaan penampungan limbah B3, penilaian kepatuhan tenant, dan pelaksanaan sertifikasi dan surveillance ISO 14001:2015.

Sedangkan program kegiatan yang sifatnya tambahan antara lain: pemeliharaan drainase, pemeliharaan kolam Pelabuhan, pemeliharaan dermaga, pelaksanaan jumat bersih, dan koordinasi dengan stakeholders terkait. Untuk tahun 2024, skor rata-rata PPN Pekalongan pada aplikasi SELARASKAN adalah 90,29.

Gambar 13. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 14001:2015 di PPN Pekalongan





13. Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

Kegiatan Sosialisasi Sertifikat CPIB Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan Aula Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal pada tanggal 29 Mei 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 34 (tiga puluh empat) peserta dengan narasumber Bapak Joko Rianto, S.Pi, M.Pi. (Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda dari PPN Pekalongan).

Narasumber menyampaikan materi terkait cara penanganan ikan yang baik, meliputi: prinsip penanganan ikan yang baik, jenis racun dan gejalanya, sanitasi dan hygiene, dan peran pelabuhan perikanan dalam upaya mendukung jaminan mutu.

Pada kegiatan Sosialisasi Sertifikat CPIB ini, peserta yang hadir diberikan pula sertifikat sosialisasi SCPIB.. Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat dari penerbitan Sertifikat CPIB. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil tangkapan saat di atas kapal sampai dengan kegiatan pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan. Harapannya dengan adanya sertifikat tersebut, mutu hasil tangkapan nelayan di PPN Pekalongan dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan penerbitan Sertifikat CPIB di PPN Pekalongan dapat meningkat.

Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta, didapatkan kesimpulan bahwa peserta yang hadir dari ABK, nakhoda, perusahaan pengolah ikan, penyuluh perikanan dan instansi terkait bersedia untuk mendukung pelaksanaan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik. Selanjutnya pihak yang berkepentingan dalam hal ini PPN Pekalongan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan sertifikasi.

Gambar 14. Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik



14. Pertemuan Dengan Pengguna Jasa Terkait Fungsi Perusahaan di PPN Pekalongan

Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan dengan Pengguna Jasa Terkait Fungsi Perusahaan di PPN Pekalongan dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Maret 2024, di Balai Pertemuan PPN Pekalongan. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala PPN Pekalongan, Kartono, A.Pi., M.P. dan dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang peserta yang terdiri atas instansi terkait dan para pelaku usaha perikanan tangkap di lingkup PPN Pekalongan meliputi Kepala UPTD TPI Kota Pekalongan, Satwas SDKP Wilker Pekalongan, pemilik atau pengurus kapal, pengguna jasa Wisata Bahari, pedagang eceran (bakul ikan), dan Akademisi dari Universitas Pekalongan. Sedangkan narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Joko Rianto, S.Pi., M.Si.

Kegiatan ini merupakan sarana untuk melaksanakan diskusi serta menyampaikan berbagai informasi terkini di lingkup PPN Pekalongan khususnya terkait pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan PNBPN di PPN Pekalongan. Dalam sambutannya, Kepala PPN Pekalongan menyampaikan bahwa sektor kelautan dan perikanan hingga

kini terus mengalami transformasi dan terus-menerus mengalami kemajuan. Salah satu fokus kebijakan pemerintah saat ini dalam bidang kelautan dan perikanan adalah optimalisasi pelaksanaan PNBP khususnya di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Guna melaksanakan upaya optimalisasi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha selaku narasumber menyampaikan materi terkait “Sosialisasi Pelayanan Jasa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021”. Penerapan Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pasca Produksi merupakan salah satu program utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) yang akan mulai diterapkan secara global pada tanggal 1 Januari 2023. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, PPN Pekalongan telah menyediakan sarana dan prasarana yakni meliputi kesiapan dermaga, tempat pendaratan ikan serta pagar kawasan TPI yang telah tersedia.

Adapun penerapan Kebijakan PNBP Pasca Produksi di Jawa Tengah akan diterapkan pada beberapa Pelabuhan Perikanan diantaranya meliputi PPP Tegalsari, PPP Bajomulyo, PPP Tasik Agung dan PPP Klidang Lor. Penerapan Kebijakan PNBP Pasca Produksi tersebut menjadi penting dikarenakan hal tersebut bersinggungan langsung dengan para pelaku usaha serta memiliki resiko yang mengikat yakni tidak diperpanjangnya perizinan berusaha milik para pelaku usaha.

Alur proses pelaksanaan PNBP Pasca Produksi diawali oleh kapal perikanan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan. Enumerator Produksi melakukan penimbangan dan pencatatan hasil produksi sesuai dengan jenis hasil tangkapan yang didaratkan. Petugas Operator PIPP melakukan entry data dari enumerator yang sebelumnya telah dicek oleh Pejabat yang berwenang. Aplikasi Perizinan yakni SILAT selanjutnya menerima data dari PIPP dan kemudian diterbitkan kode billing. Apabila billing telah dibayarkan maka akan muncul info pada Aplikasi Teman SPB bawa kapal yang bersangkutan telah membayarkan PNBP Pasca Produksi.

Adapun tarif pada Kebijakan PNBP Pasca Produksi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni untuk kapal penangkap ikan berukuran <60 GT adalah sebesar 5% nilai produksi ikan pada saat didaratkan per Kg. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan

dengan ukuran >60 GT adalah sebesar 10% nilai produksi ikan pada saat didaratkan per Kg.

Jenis pelayanan jasa di PPN Pekalongan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, dan yang berbayar sebagai berikut :

- Pelayanan Jasa Tambat Labuh;
- Pelayanan Pas Masuk TPI;
- Pelayanan Pas Masuk Wisata Bahari;
- Pelayanan Jasa Kebersihan Kolam;
- Pelayanan Sewa Kendaraan dan Peralatan Berat.

Dalam kegiatan ini, juga dibahas terkait rencana pengaktifan operasional *portal gate* yang akan dilakukan di area pintu keluar masuk TPI PPN Pekalongan. Tujuannya adalah untuk memberikan ketertiban kendaraan pada saat keluar masuk TPI PPN Pekalongan juga untuk mengamankan kendaraan. Diharapkan pada saat pelaksanaan dilakukan tidak adanya kendaraan yang masih terparkir secara sembarangan. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dijelaskan pula terkait metode pembayaran, yang bisa dilakukan secara manual pembayaran secara langsung ataupun menggunakan pas masuk langganan (berupa stiker pada kendaraan maupun kartu berlangganan).

Stakeholder atau instansi terkait yang hadir bersedia dan mendukung kegiatan pengoperasionalan *portal gate* di pintu masuk dan keluar TPI PPN Pekalongan yang ditandai dengan penandatanganan Fakta Integritas Kesepakatan Penggunaan *Portal Gate* di PPN Pekalongan. Terkait dengan penerapan PNBP Pascaproduksi, perlu melaksanakan publikasi yang lebih intens agar para pelaku usaha dapat lebih tersosialisasi.

Gambar 15. Pertemuan dengan Pengguna Jasa terkait Fungsi Pengusahaan di PPN Pekalongan



15. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (Tausiyah)

Dalam rangka membangun jiwa raga yang sehat pada pegawai, maka perlu dilakukan kegiatan fisik /olah raga dan juga siraman rohani/jiwa. *Men sana in corpore sano*, adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan jiwa dan raga yang prima menjadi modal dasar bagi para pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Adapun kegiatan tersebut meliputi: senam pagi Bersama, kerja bakti, dan siraman rohani/tausiyah.

Ketiga kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari jumat pagi. Senam Pagi Bersama dilaksanakan setiap hari Jum'at minggu ke II setiap bulannya, sedangkan Kerja Bakti dilaksanakan pada minggu ke I dan ke III, dan pada minggu ke IV dilaksanakan kegiatan siraman rohani/tausiyah. Ketiga kegiatan tersebut biasanya melibatkan instansi

terkait. Adapun lokasi untuk senam pagi adalah di halaman depan Kantor PPN Pekalongan atau di Wisata Bahari PPN Pekalongan. Lokasi untuk pelaksanaan kerja bakti bervariasi, yaitu jalan depan kantor PPN Pekalongan, dermaga TPI PPN Pekalongan, ataupun Wisata Bahari PPN Pekalongan. Karena kebersihan lingkungan kantor dan ruang kerja PPN Pekalongan juga penting demi kenyamanan dalam bekerja. Pelaksanaan Kegiatan Siraman Rohani/tausiyah dilaksanakan di Balai Pertemuan PPN Pekalongan, dengan mengundang Mubaligh/Ustadz dari Kota Pekalongan dan sekitarnya, dan tema yang disampaikan menyesuaikan.

Gambar 16. Senam Pagi, Kerja Bakti, dan Siraman Rohani (tausiyah)



16. Pembanguna Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di PPN Pekalongan dilaksanakan pada 15 Maret 2019 oleh Bapak Nur Arif Azizi (Inspektorat Jenderal) dan Bapak Rymston B. Situmorang (Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap).

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PPN Pekalongan meliputi 6 (enam) area, yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Manajemen Sumber Daya

Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang merupakan komponen pengungkit. Sedangkan untuk komponen hasil meliputi Birokrasi Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan ZI-WBK di PPN Pekalongan didampingi dan diasistensi oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dan Inspektorat II Kementerian Kelautan dan Perikanan. PPN Pekalongan terus berupaya untuk memenuhi kelengkapan dokumen sebagai data dukung WBK. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan rapat internal dalam rangka penilaian mandiri maupun konsultasi dengan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dilakukan secara daring maupun secara luring.

Pada puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPN Pekalongan mendapatkan penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020 oleh Inspektur V Bapak Jayeng Catur Purewanto didampingi Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Bapak Yuliadi kepada Kepala PPN Pekalongan Bapak Kurmawan, dalam kegiatan “Pembinaan Pegawai dalam rangka Persiapan Penilaian Tim Penilai Nasional dalam Penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi serta Tata Kelola Keuangan dan Aset di PPN Pekalongan”.

Pembangunan ZI-WBK merupakan sesuatu yang bersifat kontinyu, sehingga, dalam pelaksanaannya PPN Pekalongan terus menerus untuk menjaga komitmen para pimpinan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas dan pencegahan korupsi, menerapkan sistem pengawasan internal secara baik, menciptakan kualitas komunikasi dua arah antara pemberi dan penerima layanan berjalan baik, melalui terselenggaranya pengukuran kepuasan masyarakat dan adanya forum konsultasi publik.

Pada tahun 2024, Pembangunan ZI-WBK di PPN Pekalongan tetap dilaksanakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dimana kegiatan rapat rutin internal dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian rencana kerja dilaksanakan setiap Tri Wulan. Pada

tanggal 18 Desember 2024, dilakukan kegiatan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Penilaian Mandiri pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI-WBK) dengan nilai 81,33.

Gambar 17. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi di PPN Pekalongan



17 . Sosialisasi *Technical Cooperation Guidelines* (TCG) RI-RRT

Technical Cooperation Guidelines (TCG) Republik Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok (RI-RRT) merupakan Pedoman Kerjasama Teknis terkait Investasi Usaha Perikanan Tangkap di Indonesia Melalui Kerjasama Bilateral Indonesia-China, yang menjadi salah satu isu prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Dasar pelaksanaan Kerjasama Perikanan Tangkap RI-RRT adalah UNCLOS 1982, MOU RI-RRT, dan *Implementing Arrangement* antara KKP RI dan MARA China yang kemudian diturunkan dalam Pedoman Kerjasama Teknis (*Technical Cooperation Guidelines*). Sedangkan Ruang Lingkup TCG ini meliputi: Tujuan, Ruang Lingkup

Kerjasama, Prinsip dan Prosedur, Daerah Penangkapan Ikan, Kapal Penangkapan Ikan, API, dan Kuota, Awak Kapal Perikanan, Praktik Penangkapan Ikan yang bertanggung jawab, pemantauan dan evaluasi, perubahan, penyelesaian sengketa, ketentuan akhir, pemberlakuan, masa berlaku, dan pengakhiran. Pelaksanaan kerja sama wajib dimonitor oleh para pihak untuk memastikan kepatuhan perusahaan patungan terhadap ketentuan dalam TCG dan sesuai dengan hukum di Indonesia. Terkait dengan zona penangkapan ikan yang dikerjasamakan juga tidak semua, tetapi hanya 3 (tiga) zona yaitu: Zona 2 (mencakup WPPNRI 716 dan WPPNRI 717), Zona 3 (WPPNRI 718), dan Zona 4 (WPPNRI 572 dan WPPNRI 573). Pelaksanaan kerja sama ini juga kedepannya akan melibatkan *stakeholders* terkait, seperti: pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia dan China, KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan China (*Ministry of Agriculture and Rural Affairs/ MARA*). Pedoman Kerja Sama Teknis mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya oleh para pihak dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Salah satu Pihak dapat memberikan pemberitahuan untuk memulai proses perpanjangan melalui jalur diplomatik

Dalam pelaksanaannya, PPN Pekalongan telah melakukan Sosialisasi TCG sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun rician pelaksanaannya sebagai berikut.

Tabel 32. Rekapitulasi Pelaksanaan Sosialisasi TCG RI-RRT oleh PPN Pekalongan

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Sosialisasi Internal kepada Pegawai dan Syahbandar	20 November 2024	Dilaksanakan melalui zoom meeting yang diikuti oleh Pegawai, Syahbandar, Petugas PNBK Pascaproduksi, Petugas Pendataan di PPN Pekalongan, dan di Pelabuhan Binaan
2.	Sosialisasi Personal kepada KODIM 0710/Pekalongan dan Pengadilan Negeri Pekalongan	21 November 2024	Dilaksanakan dalam rangka Silaturahmi dengan Kasdim 0710/Pekalongan dan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan

3.	Sosialisasi di PP Kluwut, Brebes	23 November 2024	Dilaksanakan di Kantor Pelayanan Syahbandar dan PNBP Pascaproduksi (KPSP) Kluwut, dengan jumlah peserta 22 orang, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. PSDKP; 2. Syahbandar PP Kluwut; 3. Petugas Pendataan/Enumerator; 4. Pelaku Usaha; 5. Pemilik Kapal; 6. Pengurus Kapal; 7. Nahkoda;
4.	Sosialisasi kepada Forkopimda dan Instansi Terkait di Kota Pekalongan	25 November 2024	Dilaksanakan di Ruang Rapat PPN Pekalongan, dengan jumlah peserta 20 orang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Walikota Kota Pekalongan (Diwakili Kepala DKP Kota Pekalongan); 2. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Dandim (Diwakili oleh PASINTEL); 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan (Diwakili oleh Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara); 4. Kapolres Pekalongan Kota (Diwakili oleh Kasatpolairud); 5. Koordinator Satwas PSDKP Wilker Pekalongan; 6. Koordinator Balai Kekarantinaan Kesehatan Wilker Pekalongan; 7. Perwakilan dari Pos TNI AL Pekalongan Kota; 8. Katimja Lingkup PPN Pekalongan
5.	Sosialisasi kepada Pelaku Usaha di Kota Pekalongan	26 November 2024	Dilaksanakan di Ruang Rapat PPN Pekalongan dan dihadiri oleh para pelaku usaha dengan jumlah 25 orang
6.	Sosialisasi di PPP Klidang Lor, Batang	28 November 2024	Dilaksanakan di Aula PPP Klidang Lor, dengan jumlah peserta 20 orang, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala PPP Klidang Lor; 2. Syahbandar PPN Pekalongan; 3. Syahbandar PPP Klidang Lor; 4. Petugas Pendataan/Enumerator; 5. Pelaku Usaha; 6. Pemilik Kapal/Pengurus Kapal; 7. ABK

7.	Sosialisasi di TPI Tanjungsari, Pemalang	2 Desember 2024	<p>Dilaksanakan di KUD Mina Miyoso Sari, Tanjungsari, Pemalang, dihadiri oleh 40 orang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadis Perikanan Kab.Pemalang; 2. Kabid Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah 3. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah; 4. KSOP Tegal Wilker Pemalang; 5. PSDKP Wilker Pemalang; 6. Penyuluh Perikanan Kab.Pemalang; 7. Ketua HNSI Cabang Pemalang; 8. Ketua KUD Mina Miyosari Pemalang; 9. Pelaku usaha/pemilik/pengurus kapal 10.ABK
8.	Sosialisasi di PPN Tegalsari, Kota Tegal	9 Desember 2024	<p>Dilaksanakan di Ruang Rapat PPN Tegalsari, dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Kepala PPN Tegalsari; 2. Kasdim KODIM 0712/Tegal; 3. Plt. Camat Tegal Barat; 4. Kapolsek Tegal Barat; 5. Babinsa Wilayah Tegalsari; 6. Bhabinkamtobmas Wilayah Tegalsari; 7. Syahbandar PPN Tegalsari; 8. Satwas SDKP Wilker Tegalsari; 9. Petugas PNBP Pascaproduksi; 10.Petugas pendataan; 11.Pegawai PPN Tegalsari; 12.Pemilik kapal, 13.Perwakilan pelaku usaha <i>cold storage</i>
9.	Sosialisasi Personal kepada Kapolres Pekalongan Kota	16 Desember 2024	Dilaksanakan dalam rangkas Silaturahmi dan Koordinasi dengan Kapolres Pekalongan Kota
10.	Sosialisasi di PPP Larangan, Kabupaten Tegal	18 Desember 2024	<p>Dilaksanakan di Kantor PPP Larangan Kabupaten Tegal, dengan jumlah peserta 70 orang, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas KP Provinsi Jawa Tengah; 2. Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Tengah; 3. KSOP Kelas IV Tegal; 4. PSDKP Wilker Tegal; 5. Polsek Kramat; 6. Pelaku Usaha

Gambar 18. Kegiatan Sosialisasi TCG RI-RRT



B. Kegiatan Fisik

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan ini telah diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung. Segala bentuk kegiatan pembangunan diharapkan memberikan multiplier effect yang luas terhadap pengguna jasa pelabuhan. Adapun rincian kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan melalui DIPA Tahun Anggaran 2024.

1. Peninggian Dermaga Bongkar

Dalam rangka peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan guna mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPN Pekalongan melakukan kegiatan pekerjaan peninggian dermaga bongkar. Kegiatan ini dilakukan karena dermaga bongkar sering terendam air banjir rob yang menyebabkan kegiatan bongkar terganggu.

Adapun tahapan pekerjaan peninggian dermaga bongkar meliputi konsultasi terkait perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Konsultan Perencana Pekerjaan Peninggian Dermaga Bongkar
Nilai Kontrak : Rp 17.900.000,00
Pelaksanaan : 15 Hari Kalender mulai 15 Februari 2024
- b. Konsultan Pengawas Pekerjaan Peninggian Dermaga Bongkar
Nilai Kontrak : Rp 11.925.000,00
Pelaksanaan : 60 Hari Kalender mulai 16 April 2024
- c. Pekerjaan Peninggian Dermaga Bongkar
Nilai Kontrak : Rp 198.506.000,00
Pelaksanaan : 60 Hari Kalender mulai 16 April 2024

Gambar 19. Peninggian Dermaga Bongkar



2. Peninggian Talud Wisata Bahari

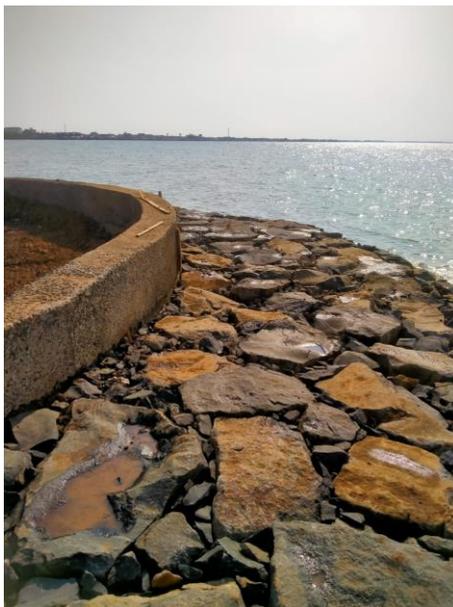
Peninggian talud di kawasan Wisata Bahari PPN Pekalongan dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat kondisi geografi dan lingkungan

sekitar pelabuhan. Kegiatan ini diperlukan dalam beberapa konteks konstruksi, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan erosi, pengamanan struktur, dan kestabilan tanah.

Adapun tahapan pekerjaan peninggian talud wisata bahari meliputi konsultasi terkait perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Konsultan Perencana Pekerjaan Peninggian Talud Wisata Bahari
Nilai Kontrak : Rp 17.900.00,00
Pelaksanaan : 15 Hari Kalender mulai 21 Februari 2024
- b. Konsultan Pengawas Pekerjaan Peninggian Talud Wisata Bahari
Nilai Kontrak : Rp 11.843.700,00
Pelaksanaan : 60 Hari Kalender mulai 25 Juli 2024
- c. Pekerjaan Peninggian Talud Wisata Bahari
Nilai Kontrak : Rp 199.463.000,00
Pelaksanaan : 60 Hari Kalender mulai 25 Juli 2024

Gambar 20. Peninggian Talud Wisata Bahari



C. Inventarisasi dan Investigasi Kerusakan Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Pemeliharaan fasilitas dan bangunan di pelabuhan penting untuk dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas supaya berfungsi dengan baik sesuai kondisi semula. Pendataan dan

monitoring perlu dilakukan secara berkelanjutan supaya langkah untuk mengantisipasi dan melakukan perbaikan fasilitas dapat lebih efektif dan efisien. Langkah antisipasi lebih diutamakan karena bangunan yang ada di tepi pantai rawan terhadap kondisi lingkungan, terutama ombak dan korosi yang di akibatkan oleh air laut. Apabila monitoring rutin tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan bangunan yang berakibat fatal pada bangunan lain maupun pada pegawai maupun *stakeholder* yang berada di lokasi tersebut. Selain itu, monitoring fasilitas berperan penting sebagai acuan untuk pemeliharaan dan penganggaran tahun berikutnya. Oleh sebab itu, pada tahun anggaran 2024 PPN Pekalongan menganggarkan kegiatan inventarisasi dan identifikasi kerusakan fasilitas. Adapun item-item pekerjaan inventarisasi kerusakan fasilitas dapat dilihat di kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

1. Penyiapan Bahan Perencanaan Pembangunan

Untuk mengatasi permasalahan di PPN Pekalongan di atas, maka dilakukan rencana pengembangan PPN Pekalongan yang diawali dengan kegiatan perencanaan (DED dan review *masterplan*) diperkirakan dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk ditindaklanjuti pada tahun ini.

2. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya

a. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya

Pada tahun anggaran 2024, PPN Pekalongan melaksanakan berbagai kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada gedung perkantoran/bangunan lainnya, sehingga diharapkan semua fasilitas tersebut dapat mendukung kegiatan operasional pelabuhan. Adapun kegiatan pemeliharaan di PPN Pekalongan yang dimasukkan dalam DIPA TA. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33. Pemeliharaan/ Perawatan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya

No.	Perawatan/ Pemeliharaan Gedung Perkantoran dan Bangunan Lainnya	Luas	Satuan	Keterangan
A.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
1.	Gedung Kantor (Bangunan Gedung Permanen)	513	m ²	Baik
2.	Balai Pertemuan Nelayan (Bangunan Gedung Pertemuan Permanen)	181	m ²	Baik

B. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya				
1.	Pagar Batas Wisata Bahari (Tanda Batas Administrasi Kepemilikan)	600	m ¹	Baik
2.	Anjungan/Gardu Pandang (Dermaga)	154	m ²	Baik
3.	Gazebo (Bangunan Gudang Terbuka)	8	Unit	Baik
4.	Gedung Syahbandar Lama (Gedung Pertemuan Permanen)	48	m ²	Baik
5.	Rumah Dinas WR Supratman (Rumah Negara Gol. II Tipe C)	135	m ²	Baik
6.	Pos Jaga Wisata Bahari (Gedung Pos Jaga Permanen)	9	m ²	Baik
7.	Pos Satpam TPI (Gedung Pos Jaga Permanen)	18	m ²	Baik
8.	Gedung Laboratorium Mini (Gedung Laboratorium Permanen)	100	m ²	Baik
9.	Gedung Pertemuan Wisata Bahari (Gedung Pertemuan Permanen)	300	m ²	Baik
10.	Gedung Aquarium (Gedung Pertemuan Permanen)	300	m ²	Baik
11.	Ruang Genset (Gudang Tertutup Permanen)	30	m ²	Baik
12.	Menara Air Bersih (Sumur Artetis)	2	UNIT	Baik
13.	Bangunan Menara/ BakPenampung (TPI Selatan dan Kantor)	2	UNIT	Baik
14.	Gudang Kantor (Gudang Tertutup Permanen)	25	m ²	Baik
15.	MCK WB dan TPI (Bangunan MCK)	156	m ²	Baik
16.	Pos Terpadu (Gedung Pos Jaga Permanen)	181	m ²	Baik
17.	Taman Wisata Bahari (Jalan Khusus Komplek)	1,500	m ²	Baik
18.	Depo Logistik (Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen)	168	m ²	Baik
19.	Wahana Edukasi Air (Gedung Olah Raga Kolam Renang)	300	m ²	Baik
20.	Bangunan Navigasi Mercusuar (Menara Suar)	1	UNIT	Baik

	Listrik Non Diesel)			
21.	Pagar Keliling Onshore (Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan)	208	m ²	Baik
22.	Tempat Peristirahatan Nelayan (Gedung Pertemuan Permanen)	100	m ²	Baik
23.	Sheetpile Wisata Bahari (Krib Pengaman Sungai/Pantai)	81	m ¹	Baik
24.	Talud Wisata Bahari (Bangunan Penguat Tebing/Pantai)	356	m ¹	Baik
25.	Revetment Samping Kantor (Dermaga)	32	m ²	Baik
26.	Pemeliharaan Pagar Kawasan Timur	710	m ¹	Baik
27.	Dermaga Barat	346	m ¹	Baik
28.	Dermaga Timur	130	m ¹	Baik
29.	Pemeliharaan Bangunan SWRO	305	m ²	Baik
30.	Mess Operator	85	m ²	Baik
31.	Pos Jaga Gapura Utara	20	m ²	Baik
32.	Pos satpam II (Timur Sungai)	30	m ²	Baik
33.	Garasi PPNP (Gedung Garasi/Pool Permanen)	80	m ²	Baik
34.	Ikon Wisata Bahari	1	Unit	Baik
C. Pemeliharaan Irigasi				
1.	Pemeliharaan Drainase Kawasan	1,500	m ¹	Baik
D. Pemeliharaan Jaringan				
1.	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1	Tahun	Baik
2.	Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	1	Tahun	Baik

b. Pemeliharaan Peralatan Penunjang dan Kendaraan Operasional

Kegiatan pemeliharaan/perawatan sarana operasional pelabuhan yang dimasukkan dalam DIPA TA. 2024 meliputi kegiatan pemeliharaan peralatan penunjang, pemeliharaan jaringan, dan pemeliharaan/operasional kendaraan dinas khusus. Sarana yang tersedia harus dipelihara secara berkala agar peralatan operasional selalu siap digunakan dalam mendukung

kegiatan operasional di PPN Pekalongan. Adapun rincian kegiatan pemeliharaan/ perawatan sarana operasional pelabuhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 34. Pemeliharaan/ Perawatan Sarana Operasional Pelabuhan

No	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Operasional Pelabuhan	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Peralatan Penunjang Operasional Kantor			
1.	Pemeliharaan & Operasional Pompa Air	2	Unit	Baik
2.	Pemeliharaan dan Operasional Pompa Filter Wahana Edukasi Air	1	Unit	Baik
3.	Pemeliharaan dan Operasional Genset	3	Unit	Baik
4.	Pemeliharaan Running Text	1	Unit	Baik
5.	Pemeliharaan Penyemprot Air Bertekanan Tinggi	1	Unit	Baik
6.	Pemeliharaan Solar Cell	94	Unit	Baik
7.	Pemeliharaan Lampu Ornamen Ikan	1	Tahun	Baik
8.	Pemeliharaan Single Post	1	Tahun	Baik
9.	Pemeliharaan Neon Box	2	Unit	Baik
10.	Pemeliharaan Drone	1	Unit	Baik
11.	Pemeliharaan Mainan Anak	19	Unit	Baik
12.	Pemeliharaan Steger	1	Tahun	Baik
13.	Pemeliharaan Videotron	1	Unit	Rusak
B	Kendaraan dinas khusus			Unit
1.	Pemeliharaan dan Operasional Forklift	3	Unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
2.	Biaya pemeliharaan dan operasional Excavator	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
3.	Biaya Pemeliharaan dan Operasional Tongkang Bermesin	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat

4.	Pemeliharaan & Operasional Dump Truck	2	Unit	Baik
5.	Pemeliharaan dan Operasional Suction Dragger	1	Unit	Rusak Berat
6.	Pemeliharaan dan Operasional SWRO	1	Unit	Rusak Ringan

BAB VI. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

I. Permasalahan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas pokok dan fungsi PPN Pekalongan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat (*public service*) memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Masih adanya *automatic adjustment* (AA)/blokir terhadap anggaran di semua Kementerian/Lembaga yang berdampak juga pada anggaran Unit Pelaksana Teknis PPN Pekalongan;
- 2) Tidak tercapainya PNBPN Non SDA Perikanan menyebabkan tidak optimalnya kegiatan dan berdampak pada realisasi anggaran;
- 3) PPN Pekalongan merupakan pelabuhan perikanan yang memanfaatkan Sungai Loji sebagai kolam dan alur pelayaran, sehingga tingkat sedimentasi tinggi baik dari laut maupun dari sungai dan adanya sumber kontaminasi terhadap produk yang berasal dari kontaminasi limbah industri, rumah tangga dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan alur pelayaran menjadi dangkal yang sering menyebabkan kandasnya kapal perikanan. Sehingga kapal awalnya akan membongkar muatannya di PPN Pekalongan, membatalkannya dan mengalihkan ke Pelabuhan lain, sehingga berdampak pada jumlah produksi ikan di PPN Pekalongan dan penerimaan PNBPN baik itu PNBPN SDA Perikanan Pascaproduksi maupun PNBPN Non SDA Perikanan;
- 4) Lokasi PPN Pekalongan berada di pesisir pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di Kota Pekalongan, dimana tingkat penurunan tanahnya tinggi (rata-rata 5,7 cm per tahun), sehingga sering dilanda banjir pasang air laut (rob). Meskipun saat ini telah dibangun parapet/tanggul di sepanjang dermaga PPN Pekalongan, tetapi banjir rob masih tetap menggenangi meskipun tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya;
- 5) Perbedaan Harga Acuan Ikan (HAI) di PPN Pekalongan dan di pelabuhan pangkalan sekitar yang cukup tinggi, menyebabkan kapal perikanan mengurungkan

membongkar muatannya di PPN Pekalongan, dan lebih memilih Pelabuhan pangkalan lain. Hal ini disebabkan perbedaan HAI tersebut akan berdampak pada PNBP SDA Perikanan yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha;

- 6) Masyarakat perikanan (pemilik/pengurus/nakhoda/ABK) belum sepenuhnya memahami kebijakan baru Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Penerapan PNBP SDA Perikanan pascaproduksi sehingga masih adanya manipulasi data produksi ikan yang dilaporkan untuk menghindari pembayaran PNBP SDA Perikanan pascaproduksi yang tinggi.

II. Upaya Pemecahannya

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guna pemecahan masalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Perencanaan anggaran dan kegiatan yang lebih presisi, untuk meminimalisir revisi, baik revisi DIPA maupun POK;
- 2) Mengoptimalkan pencapaian PNBP Non SDA dengan meningkatkan pelayanan, fasilitas, sarana, dan prasarana, sehingga berdampak pada realisasi anggaran dan kegiatan;
- 3) Sebagai solusi jangka pendek, dilakukan pemeliharaan alur pelayaraan (Sungai Loji), dengan melakukan pengerukan dengan menggunakan excavator/ponton secara rutin;
- 4) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan *onshore*, serta pengembangan fasilitas pelabuhan yang lebih memadai, sehingga pelabuhan lebih layak teknis dan lebih higienis, serta dapat memacu peningkatan produksi ikan di PPN Pekalongan;
- 5) Mengusulkan revisi penetapan Harga Acuan Ikan (HAI) ke kantor pusat KKP, sehingga perbedaan dengan pelabuhan pangkalan lain di sekitar tidak terlalu tinggi;
- 6) Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan PNBP pasca produksi secara intensif kepada masyarakat perikanan.

BAB VII. PENUTUP**1. Kesimpulan**

- a) Optimalisasi Penyerapan Anggaran PPN Pekalongan Tahun Anggaran 2024 mencapai 98,30 % dari target yang ditentukan sebesar 100%;
- b) Capaian Indikator Kinerja Utama PPN Pekalongan secara keseluruhan mencapai 117,54 %;
- c) Pada tahun 2024, jumlah kapal perikanan aktif di PPN Pekalongan semakin menurun. Dengan mulai diimplementasikannya PNBP SDA Perikanan Pascaproduksi, dan adanya pilihan 2 (dua) pelabuhan pangkalan, kapal perikanan lebih memilih membongkar muatannya di pelabuhan lain yang Harga Acuan Ikan (HAI)-nya lebih rendah dari PPN Pekalongan;
- d) Sedimentasi muara dan alur Sungai Loji yang menjadi alur pelayaran ke dermaga PPN Pekalongan menjadi masalah klasik yang terus menerus akan berulang. Meskipun telah dilakukan pengerukan dengan menggunakan excavator, namun hal ini hanya merupakan solusi sementara. Solusi jangka panjang adalah pembangunan Pelabuhan onshore Pekalongan, guna mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan seperti pada tahun 1990an;
- e) Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik telah dilaksanakan dengan baik meskipun hasilnya belum optimal;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal dan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) di kawasan pantai utara Jawa Tengah pada tahun 2024 oleh PPN Pekalongan telah berjalan lancar meskipun belum optimal;
- g) Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNBP SDA Perikanan Pascaproduksi di PPN Pekalongan terus dilaksanakan pada tahun 2024, meskipun belum tercapai target yang ditentukan.

2. Saran dan Kritik

- a) Untuk mengoptimalkan penyusunan laporan tahunan masing-masing penanggungjawab kegiatan pada akhir tahun agar menyusun bahan laporan sebagaimana dimaksud untuk segera dikumpulkan pada Tim Kerja Dukungan Manajemen, sehingga penyusunan dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat;
- b) Masing-masing penanggungjawab kegiatan agar dapat mendokumentasikan/ mengarsipkan setiap jenis kegiatan yang digunakan sebagai bahan laporan, sehingga penyusunan laporan tahunan dapat disusun secara lengkap;
- c) Pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam RKAKL agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan dituangkan dalam rencana operasional kegiatan;
- d) Terkait dengan aset PPN Pekalongan, perlu adanya koordinasi lebih lanjut dan intensif dengan PT Perikanan Indonesia Cabang Pekalongan mengenai status kepemilikan BMN guna tertib asset dan pengelolaannya;
- e) Terus mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap agar segera membangun pelabuhan *onshore* guna lebih meningkatkan produksi perikanan PPN Pekalongan;
- f) Mendukung pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan penarikan PNBPN SDA Perikanan Pascaproduksi sebagai salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan terus melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi secara intensif kepada pelaku usaha, sehingga dapat berjalan optimal dan tercapai target yang ditentukan.

Dengan disusunnya Laporan Tahunan PPN Pekalongan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada khususnya maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada umumnya, dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perikanan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.